



**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN**

LAPORAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM



**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Semester I. Maksud dan tujuan dari Laporan ini adalah sebagai laporan dalam pelaksanaan tugas untuk koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Pasuruan.

Adapun dokumen ini berisi penjelasan mengenai capaian dan analisis data kemiskinan, permasalahan, tantangan, serta tindak lanjut di Kabupaten Pasuruan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga semua kritik dan saran sangat diperlukan.

Semoga dokumen ini dapat mempermudah proses pada tahap selanjutnya, dan bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan kedepannya. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 18 Juli 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan
Selaku Sekretaris TKPK
Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM

A. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin. Berdasarkan pasal 18 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 (tiga) kelompok program, yaitu:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan berdasarkan pasal 19 Permandagri Nomor 53 Tahun 2020 adalah ber dasarkan pada data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Data dimaksud dapat dipersepsikan sebagai data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinaan ekstrem merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas untuk menyiapkan data penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan nama dan alamat (by name, by address). Kemenko PMK menetapkan Data P3KE sebagai

basis data pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan hasil pemutakhiran data dari Kemenko PMK yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk menetapkan ketetapan jumlah sasaran P3KE melalui beberapa variabel. Ketersediaan variabel pada basis data P3KE antara lain meliputi variabel nama, alamat, variabel sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan (kurang lebih 47 variabel). Pemeringkatan menggunakan PMT standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan.

Serta menggunakan data dari regsosek sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi merupakan data sosial ekonomi seluruh penduduk dan memiliki peringkat kesejahteraan. Data regosek dapat mengidentifikasi penduduk yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan, baik di hunian formal maupun informal. Data ini bersumber dari hasil pendataan lapangan oleh Tim BPS Pusat dan Daerah. Variabel yang tersedia dalam basis data ini mencakup nama, alamat, variabel sosial ekonomi (terdiri lebih dari 50 variabel).

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 dibiayai oleh beberapa sumber yaitu program penanggulangan kemiskinan yang di biayai oleh: (1) APBN sebagai program nasional; (2) APBD Provinsi Jawa Timur sebagai program provinsi; (3) APBD Kabupaten Kabupaten Pasuruan sebagai program daerah; (4) Dana Insentif Daerah (DID) dan (4) dibiayai oleh sumber dana dari dunia usaha sebagai program CSR.

1. Program Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Adapun program konkret Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Program Konkret Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan

No	Program	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Perangkat Daerah
1	PKH+	Bantuan sosial	5000 lanjut usia di atas 70 tahun	Dinas Sosial
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bantuan Sosial Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bantuan Sosial keluarga miskin dan rentan yang	Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan	Dinas Sosial

No	Program	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Perangkat Daerah
		menerima bantuan sosial pangan	sosial pangan	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Dinas Sosial
5	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Olahan pangan (Berbahan dasar ikan)	50 orang Wirausaha baru di Kec. Lekok	Dinas Koperasi UKM
6	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Olahan Pangan	30 orang Wirausaha baru berdomisili di Wilayah Kec. Prigen, Purwosari, Purwodadi, Sukrejo, Bangil, Beji, Rembang, Tukur dan Kraton	Dinas Koperasi UKM
7	meningkatkan produktivitas	Pelatihan Handycraft	25 Orang Wirausaha Pemula yang	Dinas Koperasi UKM

No	Program	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Perangkat Daerah
	dan pendapatan	(Pewarnaan alam	berdomisili di Wilayah Kec. Prigen, Purwosari, Purwodadi, Sukrejo, Bangil, Beji, Rembang, Tuter dan Kraton	
8	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Tata Rias	25 Orang Wirausaha Pemula yang berdomisili di Wilayah Kec. Prigen, Purwosari, Purwodadi, Sukrejo, Bangil, Beji, Rembang, Tuter dan Kraton	Dinas Koperasi UKM
9	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Digital Marketing	25 Orang Wirausaha Pemula yang berdomisili di Wilayah Kec. Rembang	Dinas Koperasi UKM
10	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Kewirausahaan	25 Orang Wirausaha Pemula yang berdomisili di Wilayah Kec. Rembang	Dinas Koperasi UKM
11	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	Pelatihan Handycraft bagi UKM (Anyaman Bambu)	25 Orang Wirausaha Pemula yang berdomisili di Wilayah Kec. Bangil	Dinas Koperasi UKM

No	Program	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Perangkat Daerah
12	meningkatkan produktivitas dan pendapatan	pelatihan keterampilan bagi perempuan berupa make up/ tata rias dan olahan pangan	12 kelompok	DP3AP2KB
13	RTLH	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	35 Unit	DPKP
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	573 unit rumah di Kabupaten Pasuruan	DPKP
15	Pembangunan jamban keluarga sehat	Pembangunan jamban	2355 unit jamban di Kabupaten Pasuruan	DPKP

Kemudian beberapa program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Matriks Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar	8	Ha	384.634.707	DAU	Pembangunan drainase dan TPT di Kec. Rembang	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	36	Unit Rumah	797.372.316	DAU	Rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6	Lokasi	641.218.300	DAU	Pembangunan PSU (PJL, drainase dan TPT)	
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	5	Unit Rumah	215.185.000	DAU	Rehab rumah bagi korban bencana	Rumah korban bencana yang direhab tidak harus milik masyarakat berpenghasilan rendah (sub kegiatan sesuai tagging pada RAD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	Dokumen	147.000.000	- DAU - BK Provinsi	- Memfasilitasi pemberian BK Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDes - Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pasar desa	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
		dalam Daerah Kabupaten/Kota								
BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3,320	orang	198.520.000	DAU	Sosialisasi KIE yang diperuntukkan bagi warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana di Kabupaten Pasuruan	
Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial (p1)	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	520	Orang	59.967.000	DAU	Rapat koordinasi pendataan penerima bansos	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	858000	keluarga	452.991.975	DAU	Rakor PKH	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembagnan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	9040	keluarga	21.971.775.000	DAU/DBHC HT	Pemberian BLT dan Bansos Kemiskinan Ekstrem	
	Program penanganan bencana (P2)	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	35000	orang	99.989.930	DAU	Pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program rehabilitasi sosial (P1)	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	210	orang	430.027.000	DAU	pemberian bantuan permakanan bagi anak terlantar di luar panti	
			Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	80	orang	20.465.680	DAU	fasilitasi pemberian bantuan alat dari dinsos provinsi	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spriritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	300	orang	220.602.600	DAU	bansos sembako bagi lansia	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	1170	orang	276.154.700	DAU	bansos sembako anak terlantar	
			Pemberian Layanan Rujukan	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	30	orang	45.500.000	DAU	fasilitasi pendampingan rujukan bagi anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program Pemberdayaan Sosial (P2)	Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan Kabupaten/kota	334	Keluarga	760.708.600	DAU	Bantuan Sembako lansia	
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	288	orang	138.552.700	DAU	tali asih pilarsos (PSM)	
			Peningkatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang menignakt kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	288	orang	340.152.700	DAU	tali asih pilarsos (TKSK)	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabuapten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	72	Keluarga	140.000.000	DAU	Bimtek puskesmas/SLRT	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	Laporan	50.000.000	DAU	Pelatihan olahan pangan berbasis sumber daya lokal dan sosialisasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sasaran pelaku usaha kecil olahan pangan lokal

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16	Laporan	845.180.300	DAU	Pelatihan pengembangan kedelai, pelatihan pengembangan IP400, Kebun Dinas Hortikultura, Kebun Dinas Tanaman Pangan, Promosi produk unggulan daerah, Pelatihan pasca panen jagung, SL Tata Guna Air, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat	IP400 1 kali pertemuan sejumlah 25 orang KT Genteng Makmur Ds kluwut Kec Wonorejo, pelatihan kedelai 1x pertemuan sejumlah 25 orang di KT Sri rejeki III Ds Kolursari Kec Bangil, pelatihan pasca panen jagung 1x pertemuan sejumlah 50 orang di KT Sekar Mulyo Ds Karanglo Kec Grati, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat di KWT Sri Rejeki Ds Tambaksari Kec Purwodad, Promosi produk unggulan dilaksanakan di tingkat lokal, regional dan nasional, menyesuaikan event dan ketersediaan anggaran. (menunjang juga di Ketahanan Pangan)

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 unit	unit	1.905.711.801	DBHCHT	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Pelatihan Budidaya Tembakau, Pengembangan Pola Kemitraan, Pelatihan Pasca Panen, Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, Pelatihan Manajemen Agribisnis, Pelatihan Penentuan Grade)	Kabupaten Pasuruan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	Ha	250.000.000			
				- SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanakan 12 kali pertemuan	KT Madu Legi Ds Plintahan Kec Pandaan (Rp.75.000.000)
				- SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanakan 2 kali pertemuan	KT Sri Rejeki II Ds. Kambinganrejo Kec Grati (Rp. 25.000.000)
				- SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanakan 2 kali pertemuan	KT Sumber Rejeki II Ds.Kedawung Wetan Kec Grati (Rp.25.000.000)

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
				- SLTata Guna Air				DAU	dilaksanakan 3 kali pertemuan	SLTGA Desa Rowogempol Kec. Lekok (Rp. 25.000.000)
				- SLPHT Tanaman Perkebunan				DAU	dilaksanakan 10 kali pertemuan	KT. Podo Joyo Desa Puspo Kec. Puspo (Rp. 50.000.000)
				- Sekolah Lapang Iklim SLI				DAU	dilaksanakan 12 kali	KT Dadi Makmur I Ds Purwodadi Kec Purwodadi (Rp. 50.000.000)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5	Unit	291.199.800	DAU	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	lokasi di KT. Gunting Ds. Rowogempol Kec. Lekok (menunjang juga di Ketahanan Pangan)
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35	Unit	478.552.000	DAU , DBHCHT	Pembangunan Jalan usaha Tani	Lokasi : (menunjang juga di Ketahanan Pangan) 1. KT. Tegal Arum Ds. Puspo Kec. Puspo (DAU) 2. KT. Mulyo Rejo Ds. kedungrejo Kec. Winongan (DBHCHT) keterangan : setelah survey ulang pada 7 februari 2025 lokasi sudah ada bangunan sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35	Unit	294.999.900	DAU	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Lokasi KT. Tunas Tani Ds. Dandanggendis Kec. Nguling (menunjang juga di Ketahanan Pangan)
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	150.000.000	DAU	Gelar Produk Usaha Mikro Tingkat Regional dan Tingkat Nasional : 2 event	
Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	12	Km	21.531.383.416	Pajak rokok, DAU SG, DAK, RR, DAU,	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Mendukung indikator ketahanan pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	83	liter/detik	2.899.144.146	DAU SG, pajak rokok	Pembangunan tandon air, pembangunan broncap	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	83	liter/detik	2.519.880.000	DAU, pajak rokok	Pembangunan perpipaan (baru atau lanjutan), pembangunan sumur bor	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4039	SR	220.543.680	pajak rokok	Pembangunan perpipaan dan sambungan rumah	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2	M ³ /Hari	170.496.000	DAU SG	Pembangunan MCK komunal, IPAL komunal, septik komunal	Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Dinas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	20	Kelompok	88.269.900	DAU	1. Sekolah lapang budidaya lele (Bulekpras) 2. Pembinaan Pokdakan	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	10	kelompok	106.522.000	DAU	Pelatihan pakan mandiri	
		Pengelolaan pembudidayaan ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5	unit	763.360.000	DAU	1. Normalisasi saluran Raci I 2. Jembatan tambak Raci V 3. Jalan produksi Kugar Garam Mas 4. Jalan produksi Tambakan Gedang Jaya 5. 'Jalan produksi mina Semare	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5	unit	210.800.000	DAU	Paket bantuan budidaya air tawar berupa benih lele dan pakan	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan	1	dokumen	43.642.000	DAU	Pendampingan kampung ikan	
	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	1.426	unit	837.844.000	DAU	Pembinaan Teknis Nelayan disertai pemberian bahan alat tangkap ramah lingkungan	
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	80	orang	133.622.500	DAU	1. Pelatihan Teknis Nelayan (Perawatan Mesin Perahu) di UPT PTKP3 Probolinggo 2. Pembinaan Keselamatan Kerja Nelayan di UPT Latihan Kerja Daerah Pasuruan	
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	3	kelompok	22.852.400	DAU	Sosialisasi Pembentukan KUB	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	2	unit usaha	437.501.500	DAU	1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 3. Pemberian premi asuransi untuk 1800 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan)	
Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10	Orang	35.000.000	DAU	Sosialisasi Disabilitas	
			Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100 orang	Orang	75.000.000	DAU	Pelayanan AK1/lowongan Pekerjaan	
			Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	40 Orang	Orang	5.000.000	DAU		
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (P1)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	900 Peserta	peserta	15.150.000.000	DBHCHT	Pelatihan Kompetensi	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	Laporan	2.100.693.999	DBHCHT/DAU	1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 3. Pemberian premi asuransi untuk 11400 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan)	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 Kepala Keluarga	Kepala keluarga	5.000.000	DAU	Sosialisasi Transmigrasi	
DP3AP2KB	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan tindak lanjut pengeduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	30 layanan	layanan	128.360.000	DAU, DAK Non Fisik PPA, DAU SG	Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penataan pendaftaran penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1paket	paket	221.500.000	DAU	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, Blangko KIA dan plastik KK	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil	24 Layanan	Layanan	46.360.000	DAU	Peningkatan dalam pelayanan Dokumen pencatatan sipil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 Dokumen	Dokumen	11.400.000	DAU	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam satu tahun	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10 Laporan	Laporan	79.925.000	DAU	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 Dokumen	Dokumen	18.687.006	DAU	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota di 24 kecamatan	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Dokumen	Dokumen	98.011.000	DAU	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Kab Pasuruan	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Keterangan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23	Unit	Rp754.050.000	Pelatihan teknis dan bantuan peternakan ulat sutra, bantuan 4 grobak stmj/bakso sakera, bantuan peralatan silase 10 kelompok, bantuan peralatanko mpos 9 kelompok	Anggaran masih bisa berubah, menunggu kepastian Refocusing	
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	36	Dokumen	157.495.420.131	DAU SG, DBHCHT, PAJAK ROKOK	Pembiayaan iuran jaminan kesehatan, Pembayaran Biakes Maskin	
TOTAL							237.816.730.687			

2. Program dan Kegiatan Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4. 3 Program dan Kegiatan Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
BANGIL		-											
	Kel. Kolursari	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2	unit	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Kiduldalem	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3	unit	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Pogar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2	unit	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Kauman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4	unit	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Bendumungal	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6	unit	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Kersikan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4	unit	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Gempeng												

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Kel. Dermo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Latek	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Ds. Masangan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KPM BLT - DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Ds. Raci	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KPM BLT - DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa							
	Kel. Kalianyar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Ds. Manaruwi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KPM BLT - DD	40 KPM	144.000.000	Dana Desa	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Kalirejo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3	unit	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Ds. Tambakan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KPM BLT - DD	30 KPM	97.200.000	Dana Desa	Bantuan Sosial Keungan individu untuk	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
							Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
BEJI	✓												
	Ds. Baujeng	BLT - DD	KPM BLT- DD	49 KPM	176.400.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Baujeng		3	Unit	30.000.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds.Ngembe	BLT - DD	KPM BLT- DD	33 KPM	118.800.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds.Ngembe		2	Unit	20.000.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Kenep	BLT - DD	KPM BLT- DD	36 KPM	129.600.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Sidowayah	BLT - DD	KPM BLT- DD	38 KPM	136.800.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Gajahbendo	BLT - DD	KPM BLT- DD	48 KPM	172.800.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Gunung Gangsir	BLT - DD	KPM BLT- DD	49 KPM	176.400.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Wonokoyo	BLT - DD	KPM BLT- DD	36 KPM	129.600.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Gunungsari	BLT - DD	KPM BLT- DD	35 KPM	126.000.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Cangkringmalang	BLT - DD	KPM BLT- DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Kedungringin	BLT - DD	KPM BLT- DD	35 KPM	126.000.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Kedungboto	BLT - DD	KPM BLT- DD	24 KPM	86.400.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Ds. Beji	BLT - DD	KPM BLT- DD	51 KPM	183.600.000	Dana Desa			Balai Desa		Rp. 300.000 Tiap Bulan	12 Bulan	
	Kel. Glanggang								Balai Desa				
	Kel. Pagak												
GEMPOL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bulusari	BLT - DD	KPM BLT- DD	60 KK	Rp 216.000.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 108.000.000	Desa Bulusari	Warga Desa Bulusari yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Carat	BLT - DD	KPM BLT- DD	45 KK	Rp 162.000.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 81.000.000	Desa Carat	Warga Desa Carat yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Gempol	BLT - DD	KPM BLT- DD	53 KK	Rp 190.800.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 95.400.000	Desa Gempol	Warga Desa Gempol yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Jerukpurut	BLT - DD	KPM BLT- DD	43 KK	Rp 154.800.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 77.400.000	Desa Jerukpurut	Warga Desa Jerukpurut yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Karangrejo	BLT - DD	KPM BLT- DD	54 KK	Rp 194.400.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 97.200.000	Desa Karangrejo	Warga Desa Karangrejo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Kejapanan	BLT - DD	KPM BLT- DD	77 KK	Rp 277.200.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 138.600.000	Desa Kejapanan	Warga Desa Kejapanan yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Kepulungan	BLT - DD	KPM BLT - DD	65 KK	Rp 234.000.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 117.000.000	Desa Kepulungan	Warga Desa Kepulungan yang kurang mampu	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Legok	BLT - DD	KPM BLT - DD	48 KK	Rp 172.800.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 86.400.000	Desa Legok	Warga Desa Legok yang kurang mampu	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ngerong	BLT - DD	KPM BLT - DD	54 KK	Rp 194.400.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 97.200.000	Desa Ngerong	Warga Desa Ngerong yang kurang mampu	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Randupitu	BLT - DD	KPM BLT - DD	34 KK	Rp 122.400.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 61.200.000	Desa Randupitu	Warga Desa Randupitu yang miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Sumbersuko	BLT - DD	KPM BLT - DD	42 KK	Rp 151.200.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 88.200.000	Dsa Sumbersuko	Warga Desa Sumbersuko yang miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Watukosek	BLT - DD	KPM BLT - DD	38 KK	Rp 136.800.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 68.400.000	Desa Watukosek	Warga Desa yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Winong	BLT - DD	KPM BLT - DD	48 KK	Rp 172.800.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 86.400.000	Desa Winong	Warga Desa Winong yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Wonosari	BLT DD	KPM BLT - DD	30 KK	Rp 108.000.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 54.000.000	Desa Wonosari	Warga Desa Wonosari yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Wonosonyo	BLT DD	KPM BLT - DD	44 KK	Rp 158.400.000	Dana Desa	Swakelola	Rp 79.200.000	Desa Wonosonyo	Warga Desa Wonosonyo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
GONDANGWETAN					-								Tidak ada anggaran yang di pergunakan untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
	Ds. Tebas	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 45.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 45.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Brambang	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 45.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 45.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Bayeman	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 73.800.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 73.800.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Kebon Candi	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 50.400.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 50.400.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Tenggilis Rejo	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 45.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 45.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Wonojati	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 45.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 45.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Wonosari	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 27.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 27.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Kersikan	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 36.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 36.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Karangsantul	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 54.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 54.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Gayam	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 54.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 54.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Lajuk	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 30.600.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 30.600.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Kalirejo	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 68.400.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 68.400.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Pateguhan	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 68.400.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 68.400.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Grogol	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 30.600.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 30.600.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Pekangkungan	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 27.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 27.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Kel. Gondang Wetan	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	Tidak ada anggaran yang di pergunakan untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
	Ds. Ranggeh	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 27.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 27.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Sekar Putih	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 36.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 36.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Bajangan	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 30.600.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 30.600.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
	Ds. Gondangrejo	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Warga Desa	6 Bulan	Rp 72.000.000	Dana Desa	BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa)	Rp 72.000.000	Balai Desa	Warga Desa Tidak mampu	Rp. 300.000 Tiap Bulan	Januari - Juni	
GRATI													
	Ds. Kebonrejo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keuangan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
	Kel. Gratitunon	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3	unit	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keuangan individu untuk Perbaikan	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
							Rumah Tidak Layak Huni						
KRATON													
	Ds. Pukul	BLT - DD	KPM BLT- DD	25 KK	Rp 90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45000000	Desa Pukul	Warga Desa Pukul yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Gambirkuning	BLT - DD	KPM BLT- DD	26 KK	Rp 93.600.000	Dana Desa	Swakelola	46800000	Desa Gambirkuning	Warga Desa Gambirkuning yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Mulyorejo	BLT - DD	KPM BLT- DD	51 KK	Rp 183.600.000	Dana Desa	Swakelola	91800000	Desa Mulyorejo	Warga Desa Mulyorejo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Kebotohan	BLT - DD	KPM BLT- DD	11 KK	Rp 39.600.000	Dana Desa	Swakelola	19800000	Desa Kebotohan	Warga Desa Kebotohan yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Ngabar	BLT - DD	KPM BLT- DD	24 KK	Rp 86.400.000	Dana Desa	Swakelola	43200000	Desa Ngabar	Warga Desa Ngabar yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Slambrit	BLT - DD	KPM BLT- DD	30 KK	Rp 108.000.000	Dana Desa	Swakelola	54000000	Desa Slambrit	Warga Desa Slambrit yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Jeruk	BLT - DD	KPM BLT- DD	12 KK	Rp 43.200.000	Dana Desa	Swakelola	21600000	Desa Jeruk	Warga Desa Jeruk yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Klampisrejo	BLT - DD	KPM BLT- DD	16 KK	Rp 57.600.000	Dana Desa	Swakelola	28800000	Desa Klampisrejo	Warga Desa Klampisrejo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Pingisan	BLT - DD	KPM BLT- DD	40 KK	Rp 144.000.000	Dana Desa	Swakelola	72000000	Desa Plinggisari	Warga Desa Plinggisari yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Tambaksari	BLT - DD	KPM BLT- DD	26 KK	Rp 93.600.000	Dana Desa	Swakelola	46800000	Desa Tambaksari	Warga Desa Tambaksari yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Dhompo	BLT - DD	KPM BLT- DD	12 KK	Rp 43.200.000	Dana Desa	Swakelola	21600000	Desa Dhompo	Warga Desa Dhompo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Ngempit	BLT - DD	KPM BLT- DD	25 KK	Rp 90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45000000	Desa Ngempit	Warga Desa Ngempit yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Sidogiri	BLT - DD	KPM BLT- DD	20 KK	Rp 72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36000000	Desa Sidogiri	Warga Desa Sidogiri yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Karanganyar	BLT - DD	KPM BLT- DD	28 KK	Rp 100.800.000	Dana Desa	Swakelola	50400000	Desa Karanganyar	Warga Desa Karanganyar yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Selotambak	BLT - DD	KPM BLT- DD	32 KK	Rp 115.200.000	Dana Desa	Swakelola	57600000	Desa Selotambak	Warga Desa Selotambak yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Curahdukuh	BLT - DD	KPM BLT- DD	24 KK	Rp 86.400.000	Dana Desa	Swakelola	43200000	Desa Curahdukuh	Warga Desa Curahdukuh yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Rejosari	BLT - DD	KPM BLT- DD	10 KK	Rp 36.000.000	Dana Desa	Swakelola	18000000	Desa Rejosari	Warga Desa Rejosari yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Asem Kandang	BLT - DD	KPM BLT- DD	40 KK	Rp 144.000.000	Dana Desa	Swakelola	72000000	Desa Asemkandang	Warga Desa Asemkandang yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Tambak Rejo	BLT - DD	KPM BLT- DD	31 KK	Rp 111.600.000	Dana Desa	Swakelola	55800000	Desa Tambakrejo	Warga Desa Tambakrejo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Kalirejo	BLT - DD	KPM BLT- DD	31 KK	Rp 111.600.000	Dana Desa	Swakelola	55800000	Desa Kalirejo	Warga Desa Kalirejo yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Semare	BLT - DD	KPM BLT- DD	35 KK	Rp 126.000.000	Dana Desa	Swakelola	63000000	Desa Semare	Warga Desa Semare yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Kraton	BLT - DD	KPM BLT- DD	32 KK	Rp 115.200.000	Dana Desa	Swakelola	57600000	Desa Kraton	Warga Desa Kraton yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Pulokerto	BLT - DD	KPM BLT- DD	20 KK	Rp 72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36000000	Desa Pulokerto	Warga Desa Pulokerto yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Bendungan	BLT - DD	KPM BLT- DD	15 KK	Rp 54.000.000	Dana Desa	Swakelola	27000000	Desa Bendungan	Warga Desa Bendungan yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
	Ds. Gerongan	BLT - DD	KPM BLT- DD	20 KK	Rp 72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36000000	Desa Gerongan	Warga Desa Gerongan yang Miskin Ekstrem	300000 (perbulan)	12 Bulan	tersalur
NGULING		-											
	Ds. Sanganom	BLT - DD	KPM BLT - DD	17 KPM	61.200.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Sanganom	warga desa sanganom yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Sebalong	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Sebalong	warga desa sebalong yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Wotgalih	BLT - DD	KPM BLT - DD	35 KPM	126.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Wotgalih	warga desa wotgalih yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Watestani	BLT - DD	KPM BLT - DD	31 KPM	111.600.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Watestani	warga desa watestani yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Nguling	BLT - DD	KPM BLT - DD	45 KPM	162.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Nguling	warga desa nguling yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Sedarum	BLT - DD	KPM BLT - DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Sedarum	warga desa sedarum yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Dandanggendis	BLT - DD	KPM BLT - DD	14 KPM	50.400.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Dandanggendis	warga desa dandanggendis yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Sumberanyar	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	90.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Sumberanyar	warga desa sumberanyar yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Sudimulyo	BLT - DD	KPM BLT - DD	12 KPM	43.200.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Sudimulyo	warga desa sudimulyo yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Penunggul	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Penunggul	warga desa penunggul yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Mlaten	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Mlaten	warga desa mlaten yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Kedawang	BLT - DD	KPM BLT - DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Kedawang	warga desa kedawang yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Randuati	BLT - DD	KPM BLT - DD	10 KPM	36.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Randuati	warga desa randuati yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Kapasan	BLT - DD	KPM BLT - DD	10 KPM	36.000.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Kapasan	warga desa kapasan yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
	Ds. Watuprapat	BLT - DD	KPM BLT - DD	44 KPM	158.400.000	Dana Desa	Swakelola		Ds. Watuprapat	warga desa watuprapat yang miskin ekstrem	300.000 (perbulan)	12 bulan	
PASREPAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ds. Rejosalam	BLT -DD	KPM BLT - DD	36 KK	129.600.000	Dana Desa	Swakelola	64.800.000	Desa Rejosalam	Warga Desa Rejosalam yang miskin ekstrim	300.000 (Perbulan)	12 Bulan	Tersalur
		Ketahanan Pangan	BUMDES Rejosalam	1 Paket	324.077.400	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian modal usaha	80.000.000	Desa Rejosalam	warga desa Rejosalam di bawah naungan BUMDES	Masih dalam pembahasan	1x berkelanjutan	Tersalur
	Ds. Pohgading	BLT -DD	KPM BLT - DD	38 KK	136.800.000	Dana Desa 2025	Swakelola	68.400.000	DESA POHGADING	Warga Desa Pohgading yang miskin ekstrim	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
PRIGEN													
	Ds. Jatiarjo	BLT - DD	KPM BLT - DD	42 kk	151.200.000	Dana Desa	Swakelola	75.600.000	Desa Jatiarjo	Warga Desa Jatiarjo yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Watuagung	BLT - DD	KPM BLT - DD	42 kk	151.200.000	Dana Desa	Swakelola	75.600.000	Desa Watuagung	Warga Desa Watuagung yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Dayurejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	57 kk	205.200.000	Dana Desa	Swakelola	102.600.000	Desa Dayurejo	Warga Desa Dayurejo yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Bulukandang	BLT - DD	KPM BLT - DD	50 kk	180.000.000	Dana Desa	Swakelola	90.000.000	Desa Cowek	Warga Desa Bulukandang yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Ketanireng	BLT - DD	KPM BLT - DD	39 kk	140.400.000	Dana Desa	Swakelola	70.200.000	Desa Cowek	Warga Desa Ketanireng yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sukolelo	BLT - DD	KPM BLT - DD	38 kk	136.800.000	Dana Desa	Swakelola	68.400.000	Desa Cowek	Warga Desa Sukolelo yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Lumbangrejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	53 kk	190.800.000	Dana Desa	Swakelola	95.400.000	Desa Cowek	Warga Desa Lumbangrejo yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sukoreno	BLT - DD	KPM BLT - DD	47 kk	169.200.000	Dana Desa	Swakelola	84.600.000	Desa Cowek	Warga Desa Sukoreno yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sekarjoho	BLT - DD	KPM BLT - DD	35 kk	126.000.000	Dana Desa	Swakelola	63.000.000	Desa Cowek	Warga Desa Sekarjoho yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Gambiran	BLT - DD	KPM BLT - DD	60 kk	216.000.000	Dana Desa	Swakelola	108.000.000	Desa Cowek	Warga Desa Gambiran yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Candiwates	BLT - DD	KPM BLT - DD	45 kk	162.000.000	Dana Desa	Swakelola	81.000.000	Desa Cowek	Warga Desa Candiwates yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
POHJENTRE K	✓												
	Ds. Susukanrejo	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.118.800.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	59.400.000	Balai Desa	33 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Warungdowo	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	RP.115.200.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	57.600.000	Balai Desa	32 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Pleret	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.126.000.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	63.000.000	Balai Desa	35 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Parasrejo	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.126.000.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	63.000.000	Balai Desa	35 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Logowok	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.90.000.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	45.000.000	Balai Desa	25 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Tidu	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.122.400.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	61.200.000	Balai Desa	34 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Sungi Wetan	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.126.000.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	63.000.000	Balai Desa	35 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Sungi Kulon	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.64.800.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	32.400.000	Balai Desa	18 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
	Ds. Sukorejo	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	12	Bulan	Rp.126.000.000	Dana Desa	Penyaluran BLT Desa	63.000.000	Balai Desa	35 KPM	Rp.300.000 (perbulan)	6 Bulan	
PURWODADI	✓												
	Ds. Cowek	BLT - DD	KPM BLT - DD	44 kk	158.400.000	Dana Desa	Swakelola	79.200.000	Desa Cowek	Warga Desa Cowek yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
PUSPO													
	Ds. Puspo	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10	unit	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
							Rumah Tidak Layak Huni						
REMBANG													
	Ds. Oro-Oro Ombo Wetan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Bantuan Sosial Keungan individu untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	Kab. Pasuruan	Masyarakat MBR	20.000.000	1 kali	Belum Realisasi
SUKOREJO	✓												
	Ds. Gunting	BLT - DD	KPM BLT - DD	28 KPM	100.800.000	Dana Desa	Swakelola	50.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Pakukerto	BLT - DD	KPM BLT - DD	27 KPM	97.200.000	Dana Desa	Swakelola	48.600.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Glagahsari	BLT - DD	KPM BLT - DD	40 KPM	144.000.000	Dana Desa	Swakelola	72.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sukorejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	43 KPM	154.800.000	Dana Desa	Swakelola	77.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Karangsono	BLT - DD	KPM BLT - DD	23 KPM	82.800.000	Dana Desa	Swakelola	41.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sebandung	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola	27.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Dukuhsari	BLT - DD	KPM BLT - DD	5 KPM	18.000.000	Dana Desa	Swakelola	9.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Lecari	BLT - DD	KPM BLT - DD	12 KPM	43.200.000	Dana Desa	Swakelola	21.600.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Lemahbang	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Ngadimulyo	BLT - DD	KPM BLT - DD	40 KPM	144.000.000	Dana Desa	Swakelola	72.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Tanjungarum	BLT - DD	KPM BLT - DD	20 KPM	72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Suwayuwo	BLT - DD	KPM BLT - DD	16 KPM	57.600.000	Dana Desa	Swakelola	28.800.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Mojotengah	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola	27.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ektrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Kalirejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	8 KPM	28.800.000	Dana Desa	Swakelola	14.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Candibinangun	BLT - DD	KPM BLT - DD	42 KPM	151.200.000	Dana Desa	Swakelola	75.600.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Kenduruan	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	54.000.000	Dana Desa	Swakelola	27.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sukorame	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Curahrejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	16 KPM	57.600.000	Dana Desa	Swakelola	28.800.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Wonokerto	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
TOSARI													
	Ds. Mororejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	30 KPM	108.000.000	Dana Desa	Swakelola	54.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Podokoyo	BLT - DD	KPM BLT - DD	22 KPM	79.200.000	Dana Desa	Swakelola	39.200.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Ngadiwono	BLT - DD	KPM BLT - DD	34 KPM	122.400.000	Dana Desa	Swakelola	61.200.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Tosari	BLT - DD	KPM BLT - DD	33 KPM	118.800.000	Dana Desa	Swakelola	59.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Wonokitri	BLT - DD	KPM BLT - DD	23 KPM	72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Baledono	BLT - DD	KPM BLT - DD	22 KPM	79.000.000	Dana Desa	Swakelola	39.200.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Sedaeng	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	90.000.000	Dana Desa	Swakelola	45.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
	Ds. Kandangan	BLT - DD	KPM BLT - DD	23 KPM	72.000.000	Dana Desa	Swakelola	36.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	tersalur
TUTUR	✓												
	Ds. Ngadirejo	BLT - DD	KPM BLT - DD	20 KPM	Rp.72.000.000	Dana Desa	Swakelola	Rp.36.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan	BUMDES Ngadirejo	1 Paket	Rp.175.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	Masih dalam pembahasan	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Blarang	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	Rp.54.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.27.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan	Penyediaan Bahan Pangan Untuk Mengatasi Inflasi	13 Paket	Rp 191.000.000,00	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha	Rp.0	Desa Blarang	Warga Desa yang miskin ekstrim.		1 Kali	Belum realisasi
		Membatik	Ibu Rumah Tangga Rawan Sosial Ekonomi	10 Orang	Rp 24.475.000,00	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha	Rp.0	Desa Blarang	Wanita Rawan Sosial ekonomi		1 Kali	Belum realisasi
		Siswa Berprestasi	Menunjang Kegiatan warga	20 Orang	Rp 3.000.000,00	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi	Rp.3.000.000	Desa Blarang	Sisw Siswi Berprestasi di sekolah	Rp.1.000.000 Per Orang	1 Kali	Berjalan
	Ds. Kayu Kebek	BLT - DD	KPM BLT - DD	25 KPM	Rp.90.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.45.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	11 bulan	Berjalan
	Ds. Andono Sari	BLT - DD	KPM BLT - DD	26 KPM	Rp.93.600.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.46.800.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Bantuan Alat Pembuat Kaset	Ibu Rumah Tangga Rawan Sosial Ekonomi	50 Set	Rp13.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Alat pembuatan Kaset dan Pelatihan Pembuatan Kaset	Rp.13.000.000	Desa	Ibu Rumah Tangga Rawan Sosial Ekonomi	1 Set alat Pembuatan Kaset dan Pelatihan Pembuatan kaset	1 Kali	Terealisasi
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Andonosari	15 Ekor	Rp.270.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha Peternakan	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	15 Ekor Sapi Perah untuk 15 Orang Masyarakat Miskin Ddibawah Naungan Bumdesa	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi
	Ds. Wonosari	BLT - DD	KPM BLT - DD	18 KPM	Rp 64.800.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp 32.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Wonosari			Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha Peternakan	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes		1 kali berkelanjutan	Belum realisasi

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
		Pembangunan	Masyarakat at Miskin Ekstrim	2 Unit	Rp 20.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian bantuan material untuk pembangunan RTLH	Rp20.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	Pembangunan Rumah tidak Layak huni milik warga miskin Ekstrim	1 Kali	Berjalan
	Ds. Gendro	BLT - DD	KPM BLT - DD	15 KPM	Rp.54.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.27.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Belum realisasi
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Gendro		Rp.189.100.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha Peternakan		Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes		1 kali berkelanjutan	Berjalan
		Pembangunan	Masyarakat at Miskin Ekstrim	5 KPM	Rp.50.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian bantuan material untuk pembangunan RTLH	Rp.50.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	Pembangunan Rumah tidak Layak huni milik warga miskin Ekstrim	1 Kali	Belum realisasi
	Ds. Tlogosari	BLT - DD	KPM BLT - DD	28 KPM	Rp 100.800.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp 50.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Tlogosari	18 Ekor	Rp.270.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian Bantuan Modal Usaha Peternakan	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	18 Ekor Sapi Dara untuk 18 Orang Masyarakat Miskin Ddibawah Naungan Bumdesa	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi
		Pembangunan	Masyarakat at Miskin Ekstrim	2 Unit	Rp 20.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Pemberian bantuan material untuk pembangunan RTLH	Rp20.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	Pembangunan Rumah tidak Layak huni milik warga miskin Ekstrim	1 Kali	Berjalan
	Ds. Tukur	BLT - DD	KPM BLT - DD	10 KPM	Rp.36.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.18.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Ngembal	1 Paket	Rp.280.000.000	Dana Desa Tahun 2026	Pengadaan Hewan Ternak (Sapi atau Ayam Petelur	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	Rp.280.000.000	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi
	Ds. Pungging	BLT - DD	KPM BLT - DD	30 KPM	Rp.108.000.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.54.000.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan

Kecamatan	Desa	Program	Target	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/ kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Durasi Pemberian Bantuan	Ket
	Ds. Kalipucang	BLT - DD	KPM BLT - DD	24 KPM	Rp.86.400.000	Dana Desa Tahun 2026	Swakelola	Rp.43.200.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	13 bulan	Berjalan
	Ds. Sumber Pitu	BLT - DD	KPM BLT - DD	28 KPM	Rp.100.800.000	Dana Desa Tahun 2025	Swakelola	Rp.50.400.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Sumberpitu	17 Paket	Rp.247.600.000	Dana Desa Tahun 2026	Pemberian Bantuan Modal Usaha Peternakan	Rp.0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	17 Ekor Sapi Dara untuk 17 Orang Masyarakat Miskin Ddibawah Naungan Bumdesa	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi
	Ds. Ngembal	BLT - DD	KPM BLT - DD	22 KPM	Rp79.200.000	Dana Desa Tahun 2027	Swakelola	Rp.39.600.000	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim.	300.000 (perbulan)	12 bulan	Berjalan
		Ketahanan Pangan Hewani	BUMDES Ngembal	1 Paket	Rp.234.613.000	Dana Desa Tahun 2028	Pengadaan Hewan Ternak (Sapi atau Ayam Petelur	0	Desa	Warga Desa yang miskin ekstrim dibawah naungan Bumdes	Rp.234.613.000	1 kali berkelanjutan	Belum realisasi

3. Program Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada dasarnya tidak hanya dijalankan oleh peran pemerintah, melainkan juga melibatkan peran dari beberapa stakeholder pentahelix yaitu akademisi, dunia usaha, Masyarakat, dan media. Masing-masing berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Adapun beberapa program stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Program Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan

No	Perusahaan	Program	Kecamatan	Desa	Sasaran	Anggaran	Nama Kegiatan
1	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	ARJOSARI	100 Orang	30.299.316	Bakti Sosial ke Masjid, Yayasan dan Panti Asuhan serta Pondok Pesantren
2	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	KEMANTREN REJO	50 Orang	33.978.158	Bakti Sosial ke Desa
3	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	PATUGUHAN	100 Orang	27.388.053	Bakti Sosial ke Masjid, Yayasan dan Panti Asuhan serta Pondok Pesantren
4	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	TOYANING	100 Orang	75.930.368	Bakti Sosial ke Masjid, Yayasan dan Panti Asuhan serta Pondok Pesantren
5	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	REJOSO LOR	100 Orang	35.029.053	Bakti Sosial ke Masjid, Yayasan dan Panti Asuhan serta Pondok Pesantren

No	Perusahaan	Program	Kecamatan	Desa	Sasaran	Anggaran	Nama Kegiatan
6	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	LEKOK	TAMBAKLEKOK	75 Orang	27.527.000	Bakti Sosial ke Masjid, Yayasan dan Panti Asuhan serta Pondok Pesantren
7	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	NGULING	SUMBERANYAR	45 Orang	14.987.000	Bakti Sosial ke Pondok Pesantren
8	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	KEMANTREN REJO	116 Orang	4.320.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
9	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	ARJOSARI	183 Orang	4.752.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
10	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	JARANGAN	166 Orang	4.320.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
11	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	PATUGUHAN	116 Orang	3.024.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
12	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	REJOSO LOR	158 Orang	4.104.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
13	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	TOYANING	308 Orang	7.992.000	Santunan Anak Yatim bulan Ramadhan
14	PT TIRTA INVESTAMA	Tanpa Kemiskinan	PRIGEN	JATIARJO	821 Orang	-	PROGRAM COMDEV (ARJUNO LESTARI

No	Perusahaan	Program	Kecamatan	Desa	Sasaran	Anggaran	Nama Kegiatan
	PANDAAN PASURUAN						) OLEH PT.TIRTA INVESTAMA-PANDAAN 2024
15	PT. Cheil Jedang Indonesia	Air Bersih dan Sanitasi Layak	REJOSO	ARJOSARI	510 Orang	442.587.772	Pengadaan Sumur Air Bersih Dusun Sedengan Kidul
16	PT. Onduline Manufaktur Indonesia	Air Bersih dan Sanitasi Layak	KRATON	CURAHDUKUH	12 Orang	100.000.000	Program Jambanisasi
17	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	JARANGAN	60 Orang	21.960.000	-
18	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	SEGOROPURO	25 Orang	4.758.000	-
19	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	KRATON	TAMBAK REJO	30 Orang	11.062.000	-
20	PT. Cheil Jedang Indonesia	Tanpa Kemiskinan	REJOSO	KAWISREJO	25 Orang	2.710.053	-

Sumber: SDG's Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Tujuan utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menggandeng pihak stakeholder terkait seperti Perusahaan maupun filantropi dalam penanggulangan kemiskinan adalah untuk membangun kesadaran bersama bahwa penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan efisien. Ketika menyatukan program dari Pemerintah maupun stakeholder dalam menanggulangi kemiskinan. Stakeholder swasta dan filantropi perlu diikutsertakan untuk menerapkan konsep penciptaan manfaat bersama, sehingga perusahaan-perusahaan dan filantropi tersebut memahami pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sasaran program dalam rancangan strategi CSR. Dalam kerangka Kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini, stakeholder dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya yang terlibat dari awal untuk menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Dari hasil Kerjasama tersebut Kabupaten Pasuruan telah berhasil merangkul beberapa Perusahaan dan filantropi untuk dapat terlibat aktif dalam memberikan program ataupun kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Selain itu dukungan dari Perusahaan dan filantropi juga berupa anggaran yang bisa diberikan kepada Masyarakat baik berbentuk bantuan langsung, tindak langsung, maupun penunjang. Dengan demikian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dapat lebih efektif dan efisien.

B. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mengetahui capaian kinerja penanggulangan kemiskinan konsumsi adalah dengan melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK), Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

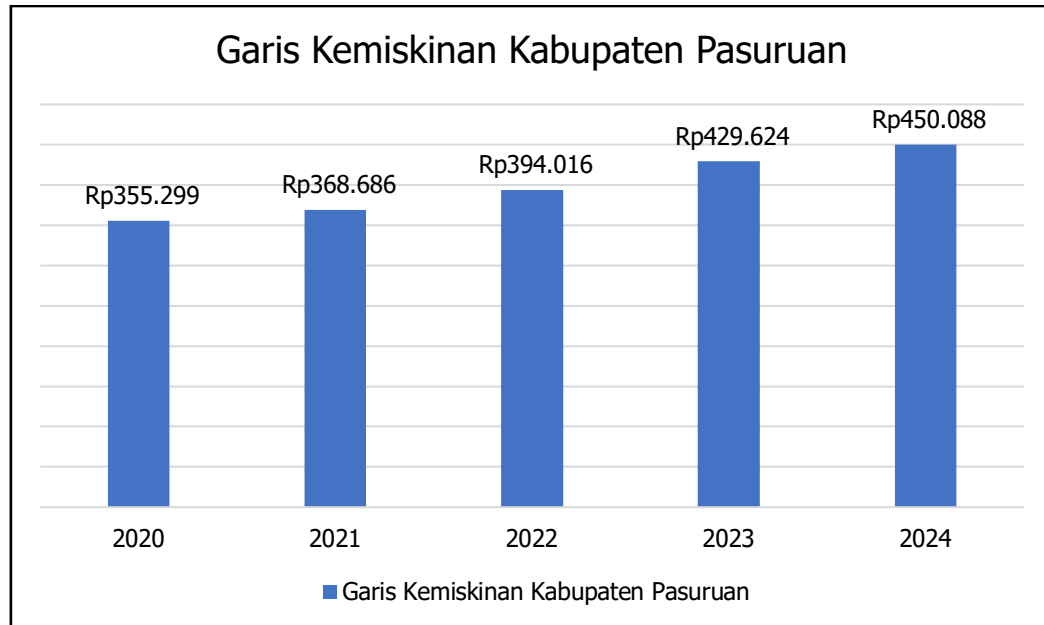
1. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Konsumsi

1) Garis Kemiskinan

Indicator yang digunakan dalam karakteristik masalah tingkat kemiskinaan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) dapat juga diartikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang berada di bawah tingkatan tersebut, maka ia dikatakan miskin. Oleh karena itu, garis kemiskinan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya angka kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan semakin banyak masyarakat yang tergolong miskin. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan atau 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Pasuruan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang disajikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang disetarakan dengan kecukupan kalori 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan pemenuhan kebutuhan dasar non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai

penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan



Gambar 4. 1 Garis Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, garis kemiskinan kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Rata rata peningkatan dari tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,7%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 dimana capaian tahun 2022 adalah Rp. 395.016, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp. 429.624. Kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 450.088, peningkatan ini menjagi parameter Kabupaten Pasuruan sudah memiliki daya beli yang baik.

Pendekatan yang paling umum digunakan untuk menghitung garis kemiskinan adalah metode asupan energi pangan atau food energy intake (FEI) (Greer dan Thorbecke, 1986). Dalam pendekatan

ini, garis kemiskinan ditentukan dengan memperhitungkan tingkat konsumsi minimum yang diperlukan untuk mencapai standar minimum kebutuhan hidup. Pendekatan FEI tidak mensyaratkan kombinasi komoditas yang harus terpenuhi untuk mencapai standar minimum tersebut, sehingga pendekatan ini mudah diterapkan dan objektif dalam memilih komoditas. Kesulitan penggunaan metode ini muncul ketika pendekatan dimutakhirkan untuk mempertimbangkan faktor perbedaan harga antardaerah (regional variation) dan perbedaan harga antarwaktu (temporal variation) akibat tidak adanya kombinasi barang yang tetap (fixed basket), sehingga indeks harga yang sesuai tidak dapat dibuat.

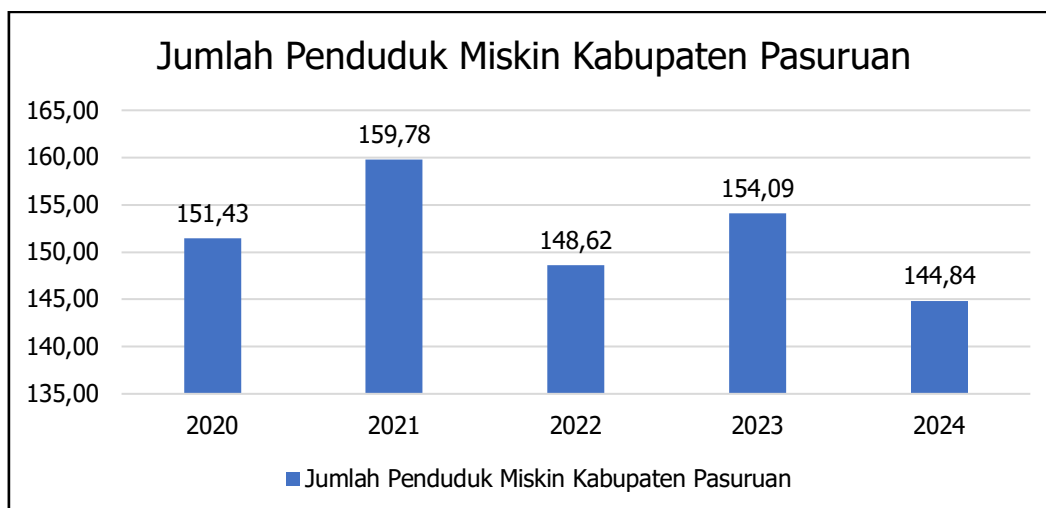
Sementara itu, dalam pendekatan biaya kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN), garis kemiskinan dihitung dalam satu periode waktu tertentu untuk sejumlah komoditas dengan bundel yang tidak berubah (tetap). Garis kemiskinan pada periode yang berbeda dihitung dengan melihat perubahan harga komoditas dalam bundel. Penjumlahan atas alokasi tetap bundel makanan dan bundel bukan makanan dikenal sebagai garis kemiskinan. Kekurangan FEI dalam memperhitungkan faktor keberagaman antardaerah dan antarwaktu dicoba untuk diatasi dalam pendekatan CBN.

Berdasarkan penjelasan diatas peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh adanya peningkatan harga komoditas daerah serta peningkatan konsumsi Masyarakat kabupaten Pasuruan. Peningkatan konsumsi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah komoditas yang dibutuhkan sehingga peningkatan permintaan komoditas tersebut berpengaruh terhadap peningkatan harga komoditas. Dengan demikian peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan Masyarakat kabupaten pasuruan dalam memenuhi konsumsi maupun komoditas.

2) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Secara umum pada Maret 2020 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif, terkecuali pada Maret 2020 – Maret 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut dipucu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19. Adapun perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan Maret 2020 – Maret 2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian jumlah penduduk miskin sebesar 141,09. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 151,43. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 159,78 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yang mencapai 148,62. Namun pada tahun 2023 capaian jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 5,47 ribu jiwa, dari 148,62 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 154,09 ribu jiwa pada Maret 2023 atau mengalami penurunan sebesar 6,98%. Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 144,84. Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan sedangkan peningkatan penduduk miskin memberi arti bahwa peningkatan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan.

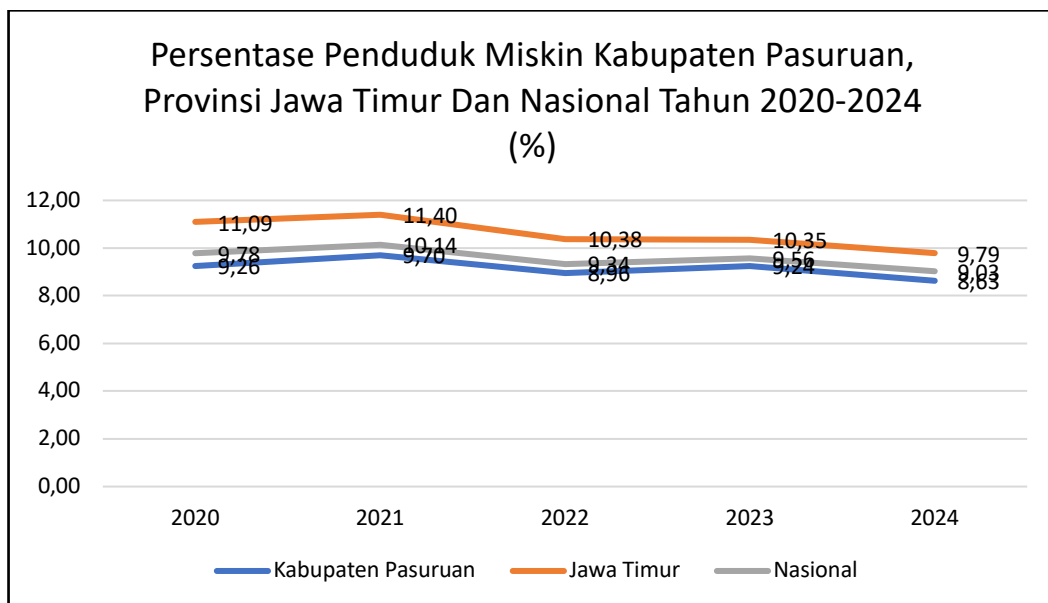
Beberapa factor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin antara lain tingkat Pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap kemiskinan. Teori ini disebut dengan teori lingkaran kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membawa peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih besar dibandingkan penduduk yang pendidikannya rendah. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang akan cenderung meningkatkan konsumsinya. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat maka dapat dikatakan kesejahteraan mereka juga meningkat sehingga jumlah penduduk miskin menurun.

Berdasarkan analisis di tingkat Kabupaten Pasuruan, tingkat pendidikan di kabupaten pasuruan cenderung stagnan. Hal ini yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin. Analisisnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka jumlah penduduk miskin akan semakin turun, sebaliknya jika semakin rendah tingkat pendidikan maka akan diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Kemudian peningkatan jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan berpengaruh penting dalam peningkatan atau pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih rendah sehingga berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya konsumsi juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsumsi

maka penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah konsumsi maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah konsumsi di Kabupaten Pasuruan masih rendah sehingga berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan.

3) Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin berasal dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Adapun capaian persentase pendudukan miskin Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar diatas. Secara umum

kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun demikian pada tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dikarenakan adanya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Berdasarkan gambar diatas capaian Persentase penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mencapai 8,63%, atau 144.84 ribu jiwa lebih rendah dari capaian tahun 2023 yang mencapai 9,24% atau 154.09 ribu jiwa.

Merujuk pada I Dewa Ayu dan I Nyoman disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin adalah tingkat kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Analisisnya adalah jika persentase tingkat kesempatan kerja naik sebesar satu persen, maka persentase penduduk miskin akan naik juga. Sedangkan apabila persentase tingkat kesempatan kerja lebih besar atau tidak naik maka persentase penduduk miskin akan cenderung menurun. Kemudian jika persentase laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar satu persen, maka persentase penduduk miskin akan menurun. Sedangkan apabila persentase laju pertumbuhan ekonomi menurun maka persentase penduduk miskin akan meningkat. Selanjutnya pada tingkat pengangguran, jika tingkat pengangguran terbuka naik, maka persentase penduduk miskin akan naik. jika tingkat pengangguran menurun, maka persentase penduduk miskin juga akan menurun. Terakhir adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, jika tingkat partisipasi angkatan kerja naik maka persentase penduduk miskin juga akan meningkat. Beberapa peningkatan faktor tersebut berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita sehingga dengan adanya peningkatan faktor dari ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pengeluaran perkapita daerah

sehingga akan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di daerah.

Dalam hal ini kondisi empiris di Kabupaten Pasuruan adalah terjadi peningkatan pada beberapa faktor seperti tingkat kesempatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Peningkatan ini berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan. Peningkatan tersebut juga didukung dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka sehingga juga ikut berkontribusi dalam peningkatan penurunan persentase penduduk miskin. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan.

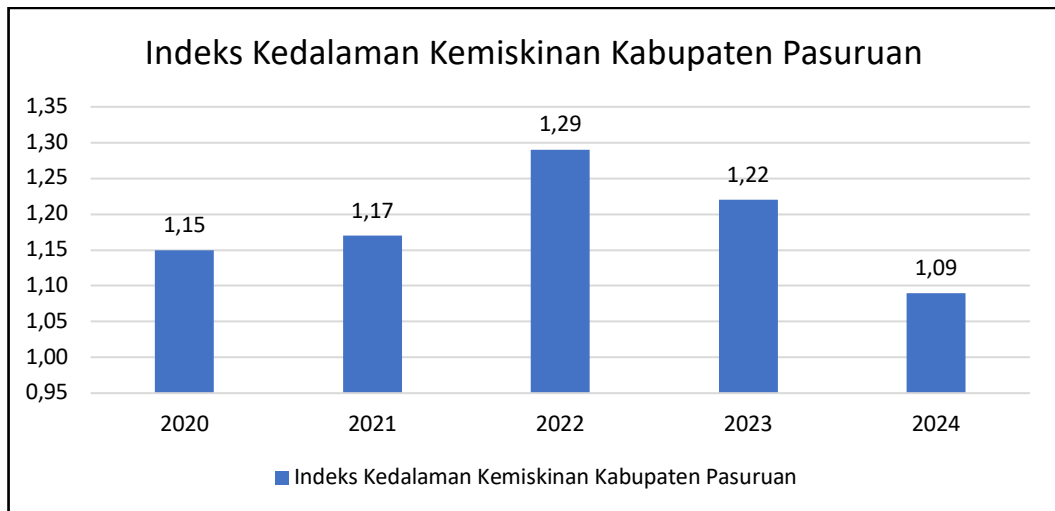
Capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 merupakan peningkatan tertinggi di Jawa Timur dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat serta pemenuhan terhadap kebutuhan lainnya. Selain itu peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan garis kemiskinan kemudian tidak diimbangi dengan pengeluaran masyarakat tiap bulan sehingga menjadi penyebab meningkatnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan menurunkan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui produktivitas dan inklusi keuangan.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman

kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2018).

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengetaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil biaya indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasa kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



**Gambar 4. 4 Indeks Kedalamanm Kemiskinan (P1)
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024**

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan gambar diatas indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi namun cenderung penurunan. Penurunan tertinggi dari tahun 2023 dengan capaian 1,22 ke tahun 2024 dengan capaian 1,09. Beberapa faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Pertumbuhan ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan diikuti dengna kemampuan daya beli di suatu daerah. Kemudian peningkatan tingkat pendidikan seperti rata lama sekolah dan harapan lama sekolah berpengaruh terhadap indeks kedalaman kemiskinan di daerah. Pendidikan memiliki peran penting dalam kemiskinan daerah. Semakin seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk berdaya dalam ekonomi. Sebaliknya, semakin seserorang tingkat pendidikan rendah maka akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir adalah pengeluaran perkapita berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan.

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran yang yang dikeluarkan untuk konsumsi sehingga dapat menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peningkatan pengeluaran perkapita maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan daerah.

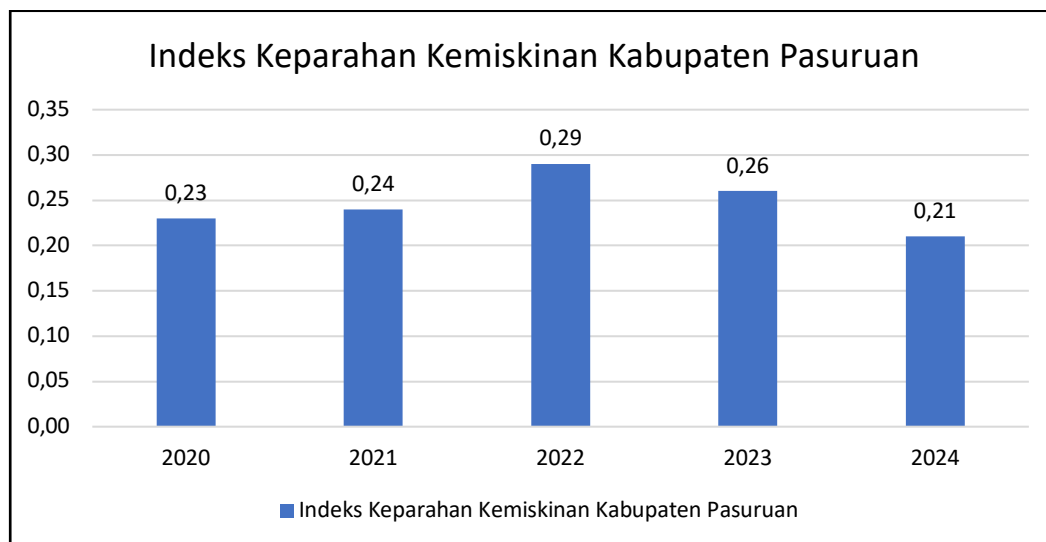
Berdasarkan analisis di lapangan bahwa penurunan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah karena adanya kemampuan Masyarakat dalam melakukan pengeluaran konsumsi. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

5) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2018).

Indeks keparahan kemiskinan adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin serta memberikan

informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Adapun data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4. 5 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinaan (P2) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Indeks keparahan kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, juga menurun dari 0,26 di tahun 2023 ke 0,21 di tahun 2024. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, beberapa faktor yang mempengaruhi indeks keparahan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Pertumbuhan ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan diikuti dengan kemampuan daya beli di suatu daerah. Kemudian peningkatan tingkat pendidikan seperti rata lama sekolah dan

harapan lama sekolah berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan di daerah. Pendidikan memiliki peran penting dalam kemiskinan daerah. Semakin seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk berdaya dalam ekonomi. Sebaliknya, semakin seseorang tingkat pendidikan rendah maka akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir adalah pengeluaran perkapita berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan. Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran yang yang dikeluarkan untuk konsumsi sehingga dapat menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peningkatan pengeluaran perkapita maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan daerah.

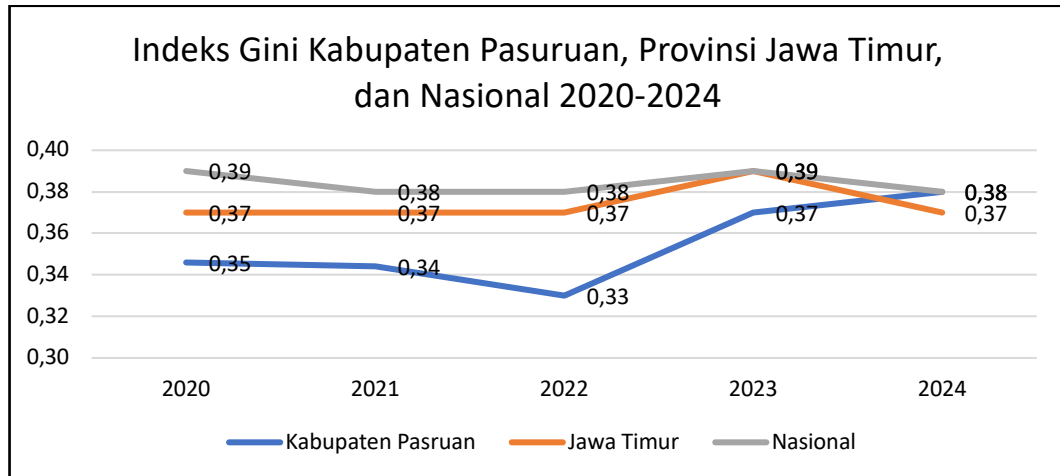
Berdasarkan analisis di lapangan bahwa penurunan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah karena adanya kemampuan Masyarakat dalam melakukan pengeluaran konsumsi. Penurunan nilai indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang menurun atau rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

6) Indeks Gini (Kesenjangan Pendapatan)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan

benar-benar sempurna terjadi. Ketimpangan pendapatan atau kesenjangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, yang tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Ketimpangan antar daerah juga merupakan hal yang umum terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan demografi yang terdapat di wilayah masing-masing. Perbedaan tersebut membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses Pembangunan juga menjadi berbeda, sehingga memunculkan istilah daerah maju dan terbelakang.

Indeks gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam (uniform) yang mewakili presentasi kumulatif penduduk. Adapun data perkembangan indeks gini Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori

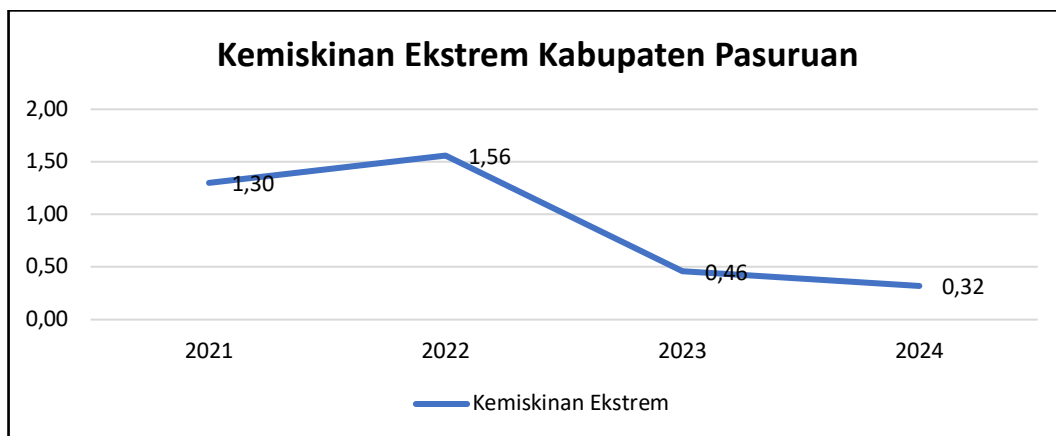
moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional. Kondisi ini dikarenakan Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh antar penduduk. Indeks gini didapatkan dari perhitungan antara pendapatan masyarakat dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk.

2. Capaian Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain adalah "Masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1.9 PPP". PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan.

Merujuk data keluaran dari Kemenko PMK, angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021-2022, persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan. pada tahun 2021 persentase penduduk miskin ekstrem mencapai 1,30%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 1,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian dari Provinsi Jawa Timur, capaian persentase kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan lebih sedikit dari capaian Provinsi

Jawa Timur yang mencapai 1,80. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 Kabupaten Pasuruan berhasil menurunkan angka Kemiskinan ekstrem. Adapun capaian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 7 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Diolah

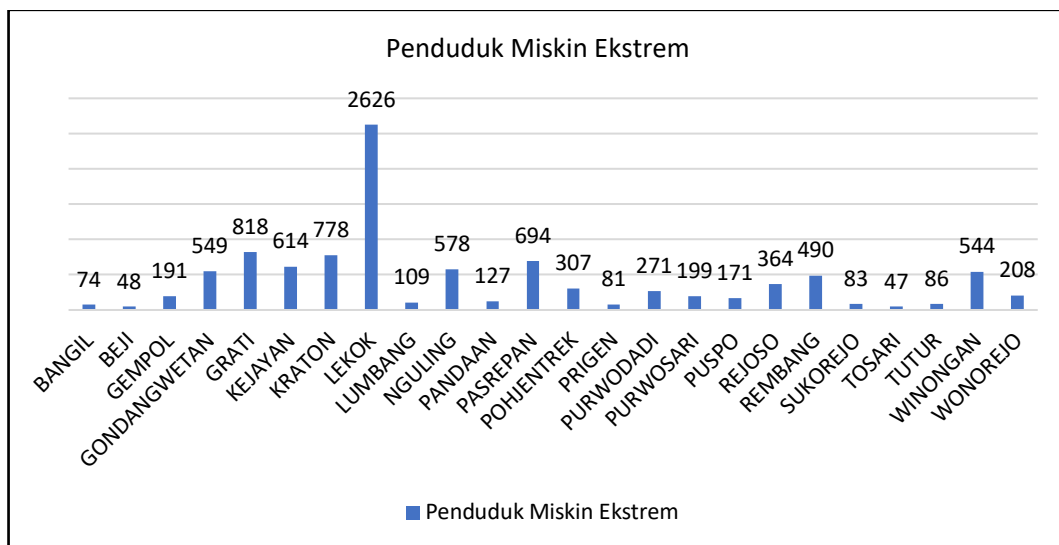
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian kemiskinan ekstrem mencapai 1,30 atau setara dengan 21.49 ribu jiwa, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 mencapai 1,56 atau sebanyak 25,79 ribu jiwa yang setelah dilakukan verifikasi dan validasi jumlahnya adalah sebanyak 27 ribu. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 0,46 ke 0,32 atau sebanyak 10.057 jiwa. Kemiskinan ekstrem menggambarkan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social.

1) Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan

makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

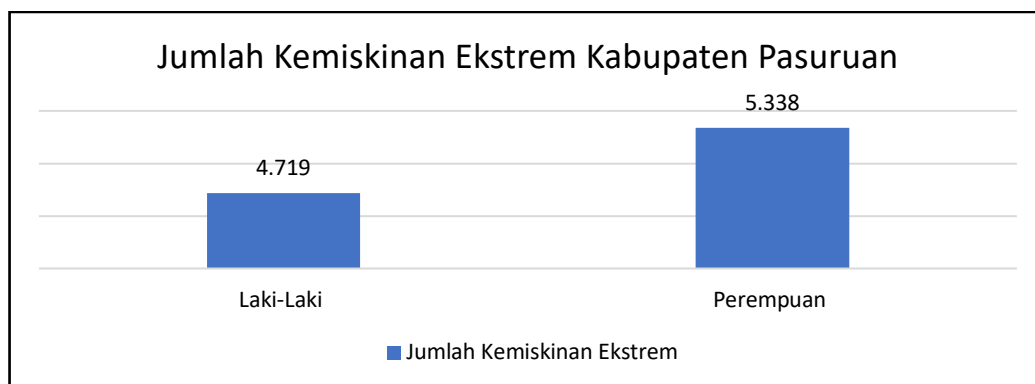
Jumlah penduduk miskin ekstrem percentil 1 dan 2 Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebanyak 10.057 jiwa. Adapun data sebaran kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 8 Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: P3KE

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



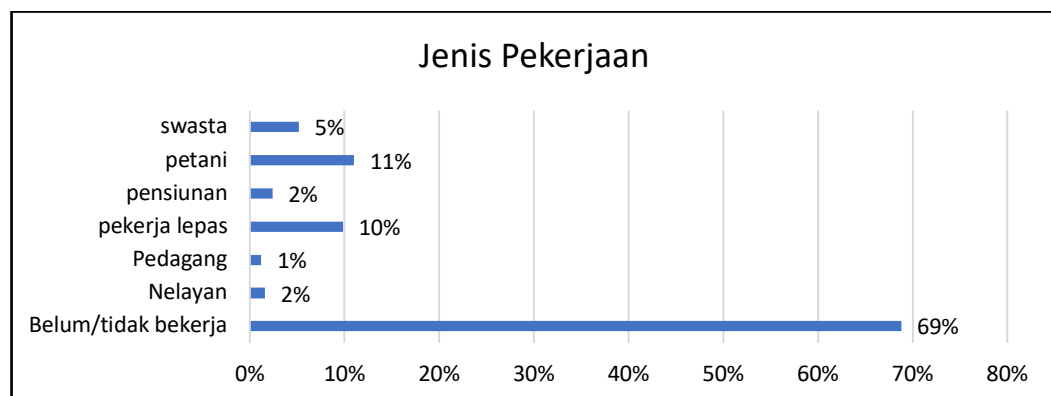
Gambar 4. 9 Jumlah Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kemenko PMK Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 10.057 dengan rincian laki laki sebanyak 4.719 dan perempuan sebanyak 5.338. Capaian tersebut menunjukkan jumlah miskin ekstrem perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social.

2) Individu berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan jenis pekerjaan. Adapun indicator yang dilihat dari jenis pekerjaan adalah nelayan, pedagang, pegawai swasta, pegawai lepas, pensiunan, petani, tidak bekerja, wiraswasta, dan lainnya. Adapun gambaran jenis pekerjaan miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



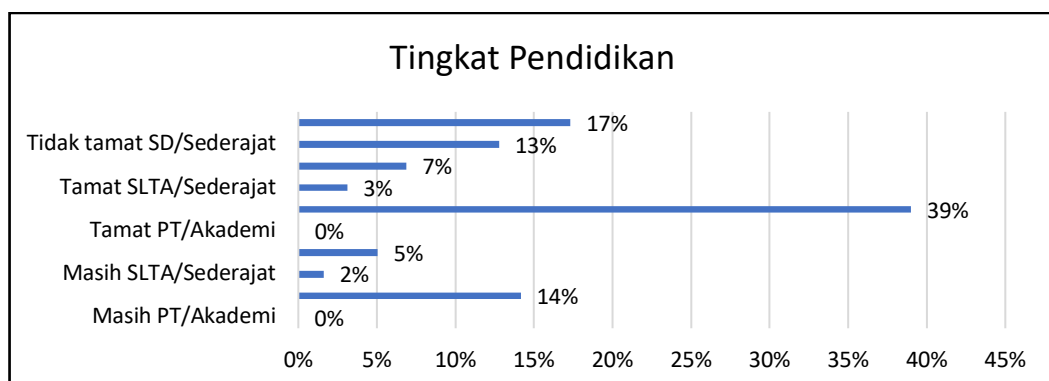
Gambar 4. 10 Persentase Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi antara penduduk yang tidak bekerja dengan penduduk yang bekerja di berbagai jenis pekerjaan. Penduduk kemiskinan ekstrem yang tidak bekerja mencapai 69% dari total penduduk kemiskinan ekstrem atau sejumlah 6.919 jiwa. Capaian ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memberikan program membuka lapangan pekerjaan agar dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan.

3) Individu berdasarkan tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan tingkat Pendidikan. Adapun indicator tingkat Pendidikan yang dilihat dalam dokumen P3KE adalah Belum Tamat SD/Sederajat, Siswa SD/Sederajat, Tamat SD/Sederajat, Tidak Tamat SD/Sederajat, Siswa SMP/Sederajat, Tamat SMP/Sederajat, Siswa SMA/Sederajat, Tamat SMA/Sederajat, Mahasiswa Perguruan Tinggi, Tamat Perguruan Tinggi, dan Tidak/belum sekolah. Adapun capaian individu kemiskinan ekstrem berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:



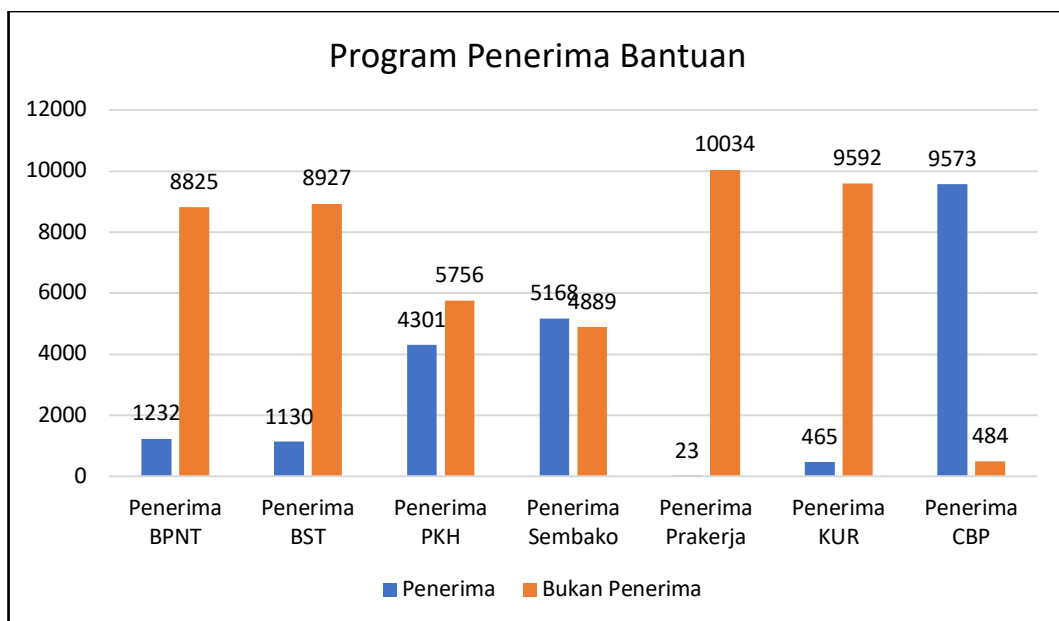
Gambar 4. 11 Individu Kemiskiaann Ekstrem Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan tertinggi bagi penduduk miskin ekstem di Kabupaten Pasuruan adalah tamat SD/Sederajat dengan persentase 39% atau sejumlah 3.923 jiwa. kemudian yang kedua adalah tidak/belum sekolah dengan persentase 17%, kemudian siswa SD/Sederajat dengan persentase 14% dan Tidak tamat SD/Sederajat 13%. Selebihnya indicator tingkat Pendidikan lainnya berada di bawah 10%.

4) Individu Penerima Bantuan

Berdasarkan gambar berikut menunjukkan individu berdasarkan penerima bantuan baik dari Penerima BPNT, Penerima BST, Penerima PKH, Penerima KUR, Penerima CBP, Penerima Sembako, dan Penerima Prakerja. Adapun capaian individu penerima bantuan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut



Gambar 4. 12 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal

Sumber: P3KE, diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Pasuruan bukan penerima bantuan. Dari 7 indikator Program Bantuan, terhadap 6 Indikator yang didominasi oleh bukan penerima. Dengan demikian dapat dilihat bahwa program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah belum mensasar individu kemiskinan ekstrem.

C. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT)

1. Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan (Semester I)

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar	0	Ha	-	DAU	Pembangunan sarana prasarana di kawasan kumuh	0	-	Masyarakat Kabupaten Pasuruan	-
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6	Lokasi	288.217.640	DAU	Pembangunan PSU (PJT, drainase dan TPT)	-	Kabupaten Pasuruan	Masyarakat Kabupaten Pasuruan	Belum dilaksanakan
	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	5	Unit Rumah	200.000.000	DAU	Rehab rumah bagi korban bencana	-	Kabupaten Pasuruan	Masyarakat yang rumahnya terdampak bencana	Rumah korban bencana yang direhab tidak harus milik masyarakat berpenghasilan rendah (sub kegiatan sesuai tagging pada RAD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Target awal = 2 Target efisiensi = 1	Dokumen	54.000.000	- DAU - BK Provinsi	- Memfasilitasi pemberian BK Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDes - Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pasar desa	-	BUMDes = 1 Desa (Desa Rejosalam Kec. Pasrepan), Desa Berdaya = 3 Desa (Desa Ranggeh Kec. Gondangwetan, Ds. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang, Ds. Kandung Kec. Winongan), Jatim Puspa = 5 Desa (Desa Janjangwulung Kec. Puspo, Desa Winongan Kidul Kec. Winongan, Desa Rowogempol Kec.	- Pemberdayaan BUMDes = Desa - Desa Berdaya = Desa - Jatim Puspa = KPM	Belum dilaksanakan, karena pelaksanaannya menyesuaikan jadwal Provinsi Jawa Timur

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
											Lekok, Desa Sadengrejo Kec. Rejoso, Desa Siyar Kec. Rembang)		
BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3,320	orang	198.520.000	DAU	Sosialisasi KIE yang diperuntukkan bagi warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana di Kabupaten Pasuruan	67.126.000	1. Desa Kebonwaris Kec. Pandaan 2. Desa Lumbangrejo Kec. Prigen 3. Desa Kalirejo Kec. Sukorejo 4. Kel. Pandaan Kec. Pandaan 5. Desa Sumberrejo Kec. Pandaan 6. Desa Wedoro Kec. Pandaan 7. Desa Kemiriswe Kec. Pandaan 8. Kel. pandaan Kec. Pandaan	Warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana	Sudah dilaksanakan
Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial (p1)	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembagnan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	8040	keluarga	22.156.275.000	DAU/D BHCHT	Pemberian BLT dan Bansos Kemiskinan Ekstrem	300.772.731	Kabupaten Pasuruan	Buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh	BLT bukan untuk masyarakat miskin tetapi untuk Buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh
	Program penanganan bencana (P2)	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	35000	orang	99.989.930	DAU	Pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana	25.564.374	Kabupaten Pasuruan	Korban Bencana alam dan bencana sosial kabupaten pasuruan	Korban Bencana alam dan bencana sosial kabupaten pasuruan
	Program rehabilitasi sosial (P1)	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi	660	orang	459.997.000	DAU	pemberian bantuan permakanan bagi anak terlantar di luar panti	393.252.750	Kabupaten Pasuruan	anak terlantar di luar panti	bansos permakanan untuk anak terlantar di luar panti

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
		gelandangan pengemis di luar panti sosial		minimal kewenangan kabupaten/kota									
			Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	80	orang	25.191.680	DAU	fasilitasi pemberian bantuan alat dari dinsos provinsi	-	Kabupaten Pasuruan	disabilitas	fasilitasi pemberian bantuan alat dari dinsos provinsi
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	240	orang	129.281.600	DAU	bansos sembako bagi anak terlantar	30.000.810	Kabupaten Pasuruan	anak terlantar	bansos sembako bagi anak terlantar
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	1720	orang	531.245.300	DAU	bansos sembako lansia	75.176.100	Kabupaten Pasuruan	lansia	bansos bagi lansia
			Pemberian Layanan Rujukan	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	40	orang	45.500.000	DAU	fasilitasi pendampingan rujukan bagi anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan	24.034.608	Kabupaten Pasuruan	anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan	fasilitasi pendampingan rujukan bagi anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan
	Program Pemberdayaan Sosial (P2)	Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan Kabupaten/kota	1077	Keluarga	995.518.158	DAU	Bantuan Sembako lansia	87.362.848	Kabupaten Pasuruan	lansia	Bantuan Sembako lansia
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	288	orang	120.253.000	DAU	tali asih pilarsos (PSM)	39.220.000	Kabupaten Pasuruan	PSM	tali asih pilarsos (PSM)

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
			Kabupaten/Kota										
			Peningkatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang menignakt kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	288	orang	386.981.785	DAU	tali asih pilarsos (TKSK)	131.732.856	Kabupaten Pasuruan	TKSK	tali asih pilarsos (TKSK)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabuapten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	Keluarga	-	DAU	Bimtek puskesmas/SLRT	-	Kabupaten Pasuruan	SLRT	efisiensi anggaran
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16	Laporan	845.180.300	DAU	Pelatihan pengembangan kedelai, pelatihan pengembangan an IP400, Kebun Dinas Hortikultura , Kebun Dinas Tanaman Pangan, Promosi produk unggulan daerah, Pelatihan pasca panen jagung, SL Tata Guna Air, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat	-	IP400 1 kali pertemuan sejumlah 25 orang Ds kluwut Kec Wonorejo. Pelatihan kedelai 1x pertemuan sejumlah 25 orang di Ds Kolursari Kec Bangil, Pelatihan pasca panen jagung 1x pertemuan sejumlah 50 orang di Ds Karanglo Kec Grati, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat di)	IP400 1 kali pertemuan sejumlah 25 orang KT Genteng Makmur Ds kluwut Kec Wonorejo. Pelatihan kedelai 1x pertemuan sejumlah 25 orang di KT Sri rejeki III Ds Kolursari Kec Bangil, Pelatihan pasca panen jagung 1x pertemuan sejumlah 50 orang di KT Sekar Mulyo Ds Karanglo Kec Grati, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat di KWT Sri Rejeki Ds Tambaksari Kec Purwodad, Promosi produk	IP400 1 kali pertemuan sejumlah 25 orang KT Genteng Makmur Ds kluwut Kec Wonorejo, pelatihan kedelai 1x pertemuan sejumlah 25 orang di KT Sri rejeki III Ds Kolursari Kec Bangil, pelatihan pasca panen jagung 1x pertemuan sejumlah 50 orang di KT Sekar Mulyo Ds Karanglo Kec Grati, Pelatihan Pasca Panen Durian dan Alpukat di KWT Sri Rejeki Ds Tambaksari

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
												unggulan dilaksanakan di tingkat lokal, regional dan nasional, menyesuaikan event dan ketersediaan anggaran. (menunjang juga di Ketahanan Pangan)	Kec Purwodad, Promosi produk unggulan dilaksanakan di tingkat lokal, regional dan nasional, menyesuaikan event dan ketersediaan anggaran. (menunjang juga di Ketahanan Pangan)
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 unit	unit	1.905.711.801	DBHCH T	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Pelatihan Budidaya Tembakau, Pengembangan Pola Kemitraan, Pelatihan Pasca Panen, Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, Pelatihan Manajemen Agribisnis, Pelatihan Penentuan Grade)	5.528.500	SL Tembakau Desa Coban Joyo dan Desa Klintar Kecamatan Kejayan Pelatihan Pupuk Organik Desa Wangkal Wetan Kec. Kejayan, Desa Kedungrejo kec Winongan dan Desa Dawuhan Kec. Nguling Pelatihan Budidaya Tembakau Pengembangan Pola kemitraan Penanganan panen dan pasca panen	Poktan Sumber Rejeki I, KT Tani Makmur, KT Tani Jaya KT Sido makmur, Poktan Sumber Makmur dan Poktan Curah kuning 9 Kecamatan 9 Kecamatan 9 Kecamatan	Kabupaten Pasuruan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	10 Ha	Ha	250.000.000						

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
			Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan									
				- SLPHT Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanak an 12 kali pertemuan	0	Desa Plintahan Kec. Pandaan	KT. Madu Legi	KT Madu Legi Ds Plintahan Kec Pandaan (Rp.75.000.000)
				- SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanak an 2 kali pertemuan	22.401.000,00	Desa Kambinganrejo Kec Grati	KT. Sri Rejeki II	KT Sri Rejeki II Ds. Kambinganrejo Kec Grati (Rp. 25.000.000)
				- SLAH Tanaman Pangan dan Hortikultura				DAU	dilaksanak an 2 kali pertemuan	7.301.500,00	Desa Kedawung Wetan Kec. Grati	KT. Sumber Rejeki II	KT Sumber Rejeki II Ds.Kedawung Wetan Kec Grati (Rp.25.000.000)
				- SLTata Guna Air				DAU	dilaksanak an 3 kali pertemuan	22.577.615,00	Desa Rowogempol Kec. Lekok	KT. Semangat	SLTGA Desa Rowogempol Kec. Lekok (Rp. 25.000.000)
				- SLPHT Tanaman Perkebunan				DAU	dilaksanak an 10 kali pertemuan				KT. Podo Joyo Desa Puspo Kec. Puspo (Rp. 50.000.000)
				- Sekolah Lapang Iklim SLI				DAU	dilaksanak an 12 kali	Refocusing (0)	Refocusing (0)		KT Dadi Makmur I Ds Purwodadi Kec Purwodadi (Rp. 50.000.000)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5	Unit	291.199.800	DAU	Pembanguna n Jaringan Irigasi Usaha Tani	6.016.000,00	Desa Rowogempol Kec. Lekok	KT. Gunting	lokasi di KT. Gunting Ds. Rowogempol Kec. Lekok (menunjang juga di Ketahanan Pangan)

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35	Unit	478.552.000	DAU , DBHCH T	Pembangunan Jalan usaha Tani	0 (pelaksanaan masih menunggu proses di ULP)	Desa Puspo Kec. Puspo	KT Tegal Arum	Lokasi : (menunjang juga di Ketahanan Pangan) 1. KT. Tegal Arum Ds. Puspo Kec. Puspo (DAU) 2. KT. Mulyo Rejo Ds. kedungrejo Kec. Winongan (DBHCHT) keterangan : setelah survey ulang pada 7 februari 2025 lokasi sudah ada bangunan sehingga tidak bisa dilaksanakan.
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35	Unit	294.999.900	DAU	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	25.822.000,00	Desa Dandangendis Kec. Nguling	KT. Tunas Tani	Lokasi KT. Tunas Tani Ds. Dandangendis Kec. Nguling (menunjang juga di Ketahanan Pangan)
Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	12	Km	21.531.383.416	Pajak rokok, DAU SG, DAK, RR, DAU,	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	172.130.813,00	Kab.Pasuruan	Petani pemakai air	Mendukung indikator ketahanan pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4039	SR	220.543.680	pajak rokok	Pembangunan perpipaan dan sambungan rumah	8.423.000,00	Kec.Gempol,Purwodadi,Purwosari	KP SPAM	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem
	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	M ³ /Hari	170.496.000	DAU SG	Pembangunan MCK komunal,	26.409.000,00	Kec.Rejoso,Purwosari		Rumah Tangga Terindikasi Stunting dan

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
	Sistem Air Limbah	Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	(SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun					IPAL komunal, septik komunal				Kemiskinan Ekstrem
Dinas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5	unit	763.360.000	DAU	1. Normalisasi saluran Raci I 2. Jembatan tambak Raci V 3. Jalan produksi Kugar Garam Mas 4. Jalan produksi Tambakan Gedang Jaya 5. Jalan produksi mina Semare	420.000,00	Desa Raci Kecamatan Bangil dan Desa Semare Kecamatan Kraton	Pokdakan calon penerima hibah pekerjaan fisik	Pekerjaan Normalisasi saluran Raci I, Jalan produksi Kugar Garam Mas dan Jalan produksi Tambakan Gedang Jaya tidak dilakukan karena efisiensi
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	5	unit	210.800.000	DAU	Paket bantuan budidaya air tawar berupa benih lele dan pakan	1.560.000,00	Desa Bandaran Kecamatan Winongan	Pokdakan calon penerima paket bantuan budidaya air tawar	Paket bantuan budidaya air tawar hanya diberikan untuk 1 pokdakan sudi lestari. 4 Pokdakan lain tidak bisa diberikan karena efisiensi
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1	dokumen	43.642.000	DAU	Pendampingan kampung ikan	0,00			

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan penangkaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	1.426	unit	837.844.000	DAU	Pembinaan Teknis Nelayan disertai pemberian bahan alat tangkap ramah lingkungan	107.766.235	- desa kalirejo, kec. Kraton - desa semedusari, kec. Lekok	- nelayan pengguna jaring insang - nelayan pengguna bubu	
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	80	orang	133.622.500	DAU	1. Pelatihan Teknis Nelayan (Perawatan Mesin Perahu) di UPT PTKP3 Probolinggo 2. Pembinaan Keselamatan Kerja Nelayan di UPT Latihan Kerja Daerah Pasuruan	50.287.500	1) - 2) Kegiatan di Rumah Makan Kurnia	2). Nelayan Kabupaten Pasuruan yang memiliki kapal	Untuk Kegiatan nomer 1 (Pelatihan Teknis Nelayan) tidak bisa dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran. Anggaran setelah efisiensi sebesar Rp. 57.119.500,-
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	3	kelompok	22.852.400	DAU	Sosialisasi Pembentukan KUB	5.957.800	Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok	Nelayan Desa Tambak Lekok	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	2	unit usaha	437.501.500	DAU	1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 3. Pemberian	205.419.000	1. Sosialisasi Asuransi di Desa Kedawang Kec. Nguling, Desa Jatirejo dan Desa Pasinan Kec. Lekok	Nelayan peserta asuransi nelayan/BPJS Ketenagakerjaan	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
									premi asuransi untuk 1800 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan)				
Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100 orang	Orang	75.000.000	DAU	Pelayanan AK1/lowongan Pekerjaan	600.000	Kabupaten Pasuruan	Pencari Kerja Terdaftar	
			Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	40 Orang	Orang	5.000.000	DAU	Pelayanan Pelatihan Wirausaha	1.675.000	Kabupaten Pasuruan	Kelompok Masyarakat	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (P1)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	900 Peserta	peserta	15.150.000.000	DBHCH T	Pelatihan Kompetensi	Nihil	Kab PAsuruan	Penyandang Isabilitas dan PEserta Forum KOMunikasi Publik	Kegiatan PBK dan MTU APBD DBHCHT, baru akan dilaksanakan Bulan Agustus 2025
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggara n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	Laporan	2.100.693.999	DBHCH T/DAU	1. Sosialisasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 2. Rapat Koordinasi Asuransi Nelayan/BPJS Ketenagakerjaan 3. Pemberian premi asuransi untuk 11400 nelayan (BPJS Ketenagakerjaan)	Nihil	Kab Pasuruan	Pekerja yang rentan (secara Ekonomi)	

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil	24 Layanan	Layanan	46.360.000	DAU	Peningkatan dalam pelayanan Dokumen pencatatan sipil	12.675.300	Kabupaten Pasuruan		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 Dokumen	Dokumen	11.400.000	DAU	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam satu tahun	5.650.000	Kabupaten Pasuruan		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi informasi administrasi kependudukan	10 Laporan	Laporan	79.925.000	DAU	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	51.413.188	Kabupaten Pasuruan		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 Dokumen	Dokumen	18.687.006	DAU	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota di 24 kecamatan	7.937.000	Kabupaten Pasuruan		
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Dokumen	Dokumen	98.011.000	DAU	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Kab Pasuruan	10.112.096	Kabupaten Pasuruan		
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Unit	Rp754.050.000	DAU	Pelatihan teknis peternakan yang diikuti dengan bantuan modal usaha berupa ternak/ gerobak/ peralatan kompos/ peralatan silase	-	Kabupaten Pasuruan	Kelompok tani ternak, kelompok masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati	Pelaksanaan TB 3/TB4

Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Ket
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	36	Dokumen	157.495.420.131	DAU SG, DBHCH T, PAJAK ROKOK	Pembiayaan iuran jaminan kesehatan, Pembayaran Biakes Maskin	103.103.231.628	Dinas Kesehatan Kab Pasuruan	Penduduk Kabupaten Pasuruan	
TOTAL							229.963.207.526			105.035.557.252			

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Semester I)

Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Nama dan Narasi Kegiatan	Nama dan Narasi Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	51	Unit Rumah	1.020.000.000	DAU	Rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0	BENDOMUNGAL DERMO KALI ANYAR KALIREJO KAUMAN KERSIKAN KIDULDALEM KOLURSARI LATEK MANARUWI MASANGAN POGAR TAMBAKAN GRATI TUNON KEBONREJO PUSPO ORO ORO OMBOWETAN	Masyarakat MBR	Belum Realisasi
Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial (p1)	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	743	Orang	44.049.800	DAU	Rapat koordinasi pendataan penerima bansos	14848277	Kabupaten Pasuruan	Anggota PKH	Rapat koordinasi pendataan penerima bansos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	858000	keluarga	140.550.000	DAU	Rakor PKH	47014738	Kabupaten Pasuruan	Anggota PKH	Rakor PKH

Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Nama dan Narasi Kegiatan	Nama dan Narasi Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	Laporan	50.000.000	DAU	Pelatihan olahan pangan berbasis sumber daya lokal dan sosialisasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	47.970.806	-Pelatihan Olahan Pangan di Desa Gejugiati Kec. Lekok , Sosialisasi Pangan B2SA di Desa Kambinganrejo Kecamatan Grati	Pelatihan Olahan Pangan : Pelaku Usaha Pangan / Masyarakat yang ingin berwira usaha , Sosialisasi Pangan B2SA : TP PKK, Kader, dan Ibu Rumah Tangga	Sasaran pelaku usaha kecil olahan pangan lokal
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10	Unit Usaha	150.000.000	DAU	Gelar Produk Usaha Mikro Tingkat Regional dan Tingkat Nasional : 2 event	Nihil	-	-	Kegiatan akan dilaksanakan pada Tribulan-3 2025, yaitu pada tanggal 31 Juli s/d 03 Agustus 2025 melalui Gelar Produk tingkat regional dalam rangka untuk memperingati Hari Koperasi dan Hari UMKM dengan mengikuti "The 12th K-UKM Expo Tahun 2025 di Royal Plaza Surabaya
Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	83	liter/detik	2.899.144.146	DAU SG, pajak rokok	Pembangunan tandon air, pembangunan broncap	7.668.000,00	Kab.Pasuruan	KP SPAM	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	83	liter/detik	2.519.880.000	DAU, pajak rokok	Pembangunan perpipaan (baru atau lanjutan), pembangunan sumur bor	103.709.000,00	Kec.Prigen,Beji,Gondangwetan,Sukorejo,Kejayan,Pandaan,Puspo, pasrepan	KP SPAM	Rumah Tangga Terindikasi Stunting, Kekeringan dan Kemiskinan Ekstrem

Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Nama dan Narasi Kegiatan	Nama dan Narasi Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
Dinas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas (kelompok)	20	Kelompok	88.269.900	DAU	1. Sekolah lapang budidaya lele (Bulekpras) 2. Pembinaan Pokdakan	7.482.500,00	2. Desa Raci Kecamatan Bangil	Pembudidaya ikan	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	10	kelompok	106.522.000	DAU	Pelatihan pakan mandiri	5.065.000,00	Kabupaten Pasuruan	Pelaku pembuat pakan mandiri	Kegiatan pelatihan pakan mandiri tidak dilakukan karena efisiensi
Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10	Orang	35.000.000	DAU	Sosialisasi Disabilitas	Nihil	Nihil	Nihil	Akan dilakukan Forum Publik dengan Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi dengan Perusahaan
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 Kepala Keluarga	Kepala keluarga	5.000.000	DAU	Sosialisasi Transmigrasi	Nihil	KAB / Kota yang menjadi tempat Transmigran asal Pasuruan	Transmigran asal Pasuruan	Akan dilakukan pada Triwulan IV 2025

Nama OPD	Nama dan Narasi Program	Nama dan Narasi Kegiatan	Nama dan Narasi Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Detail Pekerjaan/kegiatan	Realisasi (Januari-Juni 2025) (Rp)	Lokasi	Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
DP3AP2KB	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah layanan tindak lanjut penguatan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	30 layanan	layanan	128.360.000	DAU, DAK Non Fisik PPA, DAU SG	1. Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan 2. Bimtek dukungan psikologi awal	58.620.000	Kabupaten Pasuruan	1. Korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 18 layanan 2. Petugas layanan pendamping korban (Bimtek)	anggaran sub kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Penataan pendaftaran penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	1 paket	paket	221.500.000	DAU	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, Blangko KIA dan plastik KK	20.000.000	Kabupaten Pasuruan	anak usia kurang dari 17 tahun dan masyarakat / pemohon	
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P1)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	36	Dokumen	157.495.420.131	DAU SG, DBHCH T, PAJAK ROKOK	Pembiayaan iuran jaminan kesehatan, Pembayaran Biakes Maskin	103.103.231.628	Dinas Kesehatan Kab Pasuruan	Penduduk Kabupaten Pasuruan	
TOTAL							164.903.695.977			103.415.609.949			

D. Hambatan dan Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa hambatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Data

Terdapat tiga basis data dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Ketiga data tersebut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mengamanatkan data induk sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (bantuan sosial dan lain-lain). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sumber data DTKS adalah hasil pendaftaran penduduk yang telah dilakukan skrining dengan variabel khas daerah serta musyawarah kelurahan. Cakupan data DTKS meliputi penduduk dengan NIK teregistrasi di Kabupaten Pasuruan serta berdomisili di Kabupaten Pasuruan. Usulan DTKS dari daerah disampaikan ke Kemensos untuk ditetapkan. DTKS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial yang dimutakhirkan setiap bulan dan dapat digunakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketersediaan variabel pada basis data DTKS yakni nama, alamat, variabel sosial-ekonomi (kurang dari 40 variabel). Sementara itu Sasaran penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui P3KE. Kemenko PMK menetapkan Data P3KE sebagai basis data pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan hasil pemutakhiran data dari Kemenko PMK yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk menetapkan ketetapan jumlah sasaran P3KE melalui beberap variable. Ketersediaan variabel pada basis data P3KE antara lain meliputi variabel nama, alamat, variabel sosial-ekonomi dan

peringkat kesejahteraan (kurang lebih 47 variabel). Pemeringkatan menggunakan PMT standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan. Kemudian data regsosek sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor Kep. 136/M.PPN/HK/10/2023 tentang Data Registrasi Sosial Ekonomi merupakan data sosial ekonomi seluruh penduduk dan memiliki peringkat kesejahteraan. Data regosek dapat mengidentifikasi penduduk yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan, baik di hunian formal maupun informal. Data ini bersumber dari hasil pendataan lapangan oleh Tim BPS Pusat dan Daerah. Variabel yang tersedia dalam basis data ini mencakup nama, alamat, variabel sosial ekonomi (terdiri lebih dari 50 variabel). Dengan adanya sumber data yang banyak membuat Perangkat Daerah sedikit kesulitan melakukan intervensi sasaran. Selain itu dari data yang beragam tersebut tidak semuanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak kategori miskin ada yang mendapat bantuan dari Pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang beragam sehingga beberapa program kurang bisa berjalan terpadu dan tepat sasaran.

2. Kelembagaan TKPK

Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) merupakan tim penggerak penanggulangan kemiskinan daerah. Namun pelaksanaan TKPK sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan bupati tersebut masih belum optimal khususnya dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, dan komplementaris program dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

3. Kurangnya sinergitas antar Perangkat Daerah

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah memerlukan Upaya dari beberapa pihak seperti perangkat daerah terkait dan

stakeholder. Permasalahannya beberapa perangkat daerah belum mampu menjalankan peran dengan baik sehingga ketercapaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa optimal. Diperlukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam menanggulangi kemiskinan daerah.

4. Anggaran penanggulangan kemiskinan

Kinerja anggaran tahun 2023 dan 2024 banyak difokuskan pada penghapusan kemiskinan ekstrem sehingga penganggaran penanggulangan kemiskinan secara umum di Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada tahun 2025 anggaran dilakukan pendataan secara spesifik sehingga besaran jumlah anggaran tidak lebih besar dari tahun lalu. Diperlukan alokasi anggaran yang sesuai untuk mendukung tercapainya tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya pada kemiskinan daerah tapi juga kemiskinan ekstrem.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memperoleh konsep yang pas.

2. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.

Sebagian kecil masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari Pemerintah.

3. Integrasi data

Mengintegrasikan dan memperbarui data dari DTKS, Data P3KE, dan Regsosek. Pada dasarnya data mudah berubah dalam waktu

yang tidak terduga sehingga perubahan harus dilakukan dengan pertimbangan waktu yang berjangka.

4. Memaksimalkan peran dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pasuruan yang diampu oleh pejabat di lintas Lembaga. Salah satu tantangannya adalah pola koordinasi antar jabatan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan daerah. Hal ini perlu ditingkatkan pola koordinasi untuk dapat memaksimalkan kinerja TKPK Kabupaten Pasuruan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Salah satu tujuan dari dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui segala permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program serta untuk menilai efektifitas program. Berbagai permasalahan seperti sumber daya manusia dalam pelaksanaan program, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu dan jumlah dalam pelaksanaan pencairan bantuan, prosedur pelaksanaan program sudah sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) yang telah ditetapkan sebelumnya, pengaduan masyarakat dan penerima program, kurangnya integrasi data penerima sasaran sehingga berpengaruh terhadap intervensi program kegiatan, serta kurangnya sinergitas dari perangkat daerah dalam menanggulangi kemiskinan daerah. Temuan-temuan yang didapatkan selama proses monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai perbaikan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke depan. Untuk itu semua temuan selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu dibuatkan rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024 dengan melanjutkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan dengan baik.

2. Mendorong desa untuk mengoptimalkan BLT dana desa dengan mengutamakan sasaran pada masyarakat miskin ekstrem yang belum mendapatkan program penanggulangan kemiskinan sama sekali baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan: (1) menjaga stabilitas ekonomi daerah; (2) menyederhanakan prosedur perijinan; (3) meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha; (4) menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja; dan (5) meningkatkan keamanan dan ketertiban.
4. Meningkatkan keanekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
5. Melakukan pendataan keluarga miskin setiap awal tahun untuk memperoleh data perkembangan jumlah rill di lapangan agar bantuan sosial bisa tetap sasaran.
6. Mengembangkan system manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basisi data DTKS, data P3KE dan data lainnya.
7. Meningkatkan kapasitas Masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai program pemberdayaan Masyarakat.
8. Rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

F. Inovasi Penanggulangan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

1. Inovasi Kemisan Mesra

Aplikasi Kemisan Mesra adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membantu dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mengakses data kemiskinan ekstrem, menentukan sasaran intervensi, dan melakukan intervensi yang lebih spesifik berdasarkan data per individu (by name by address).

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai aplikasi Kemisan Mesra:

➤ Tujuan:

Mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

➤ Fungsi:

1. Menyediakan akses data kemiskinan ekstrem secara by name by address bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
2. Membantu perangkat daerah dalam menentukan sasaran intervensi program kemiskinan.
3. Memfasilitasi intervensi yang lebih spesifik dan terarah kepada individu atau keluarga miskin ekstrem.
4. Memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

➤ Manfaat:

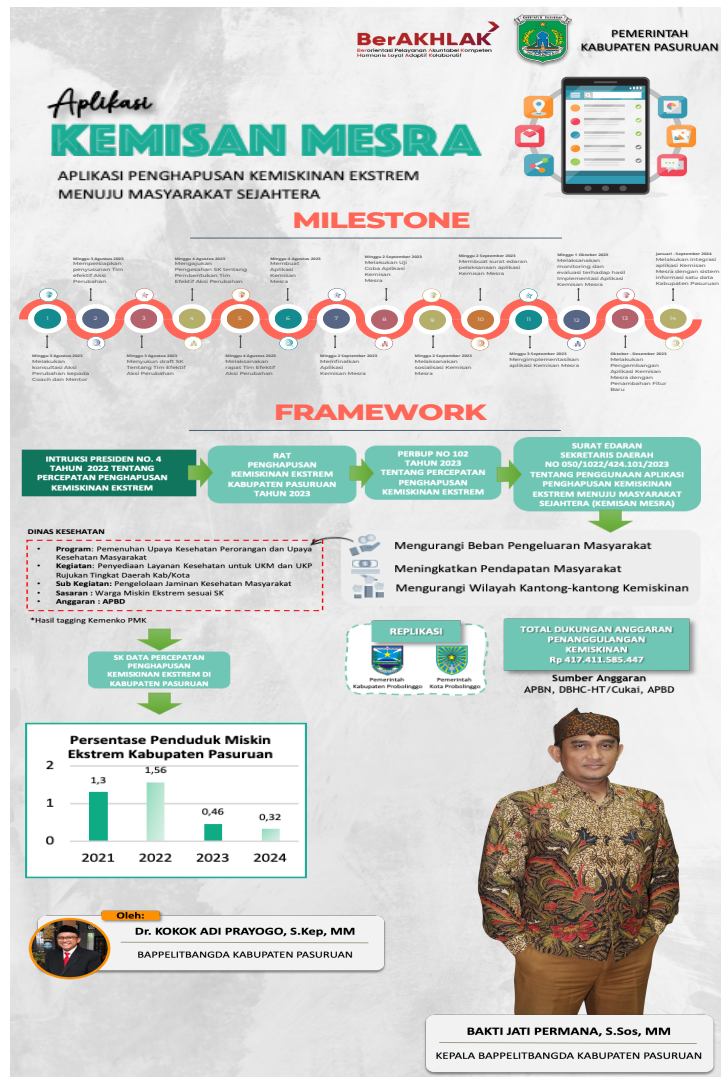
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan.
2. Memastikan bantuan dan intervensi tepat sasaran.
3. Mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, dalam penanggulangan kemiskinan.

➤ Pengembangan:

Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan, dengan bantuan tim programmer dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

➤ Dukungan:

Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan menyambut baik dan menandatangani dukungan terhadap aplikasi Kemisan Mesra, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



- **Pemerintah Kabupaten Pasuruan:**
Aplikasi ini merupakan inisiatif dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
- **Penyederhanaan Proses:**
Laskar Maslahat bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan SKTM, mulai dari pengajuan hingga penerbitan.
- **Tujuan Utama:**
Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal penerbitan SKTM.

3. Pemberdayaan Nelayan dari Lazismu

Muhammadiyah memandang bahwa persoalan kemiskinan bukan sekadar problem kesulitan ekonomi yang dapat diatasi dengan santunan, melainkan problem yang sangat kompleks, dan karena itu penanganannya membutuhkan gerakan sosial yang menyeluruh, yang meliputi pemberian akses politik dan perlindungan hukum. Muhammadiyah memandang bahwa bila masyarakat mendapatkan akses permodalan, pendidikan yang layak, jaminan hukum, dan partisipasi politik, maka kesulitan ekonomi akan berkurang. Karena itu, kebijakan negara yang berpihak kepada kaum miskin menjadi sangat penting, dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mereka juga sangat diperlukan. Gerakan sosial tersebut merupakan upaya nyata untuk membebaskan mereka dari jerat dehumanisasi dan membangun komunitas tangguh demi terwujudnya keadilan sosial.

Karena selama kemiskinan belum terhapuskan, kemampuan bangsa dalam membangun Indonesia berkemajuan akan terhambat. Kenyataan bahwa sementara ini mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan rendah dan hanya sekelompok kecil yang lulusan pendidikan tinggi menunjukkan kondisi lemahnya sumber daya manusia Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mayoritas warga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terbelenggu antara lain oleh kemiskinan.

Pemberdayaan nelayan ini tantangan sosial semakin kompleks, melibatkan berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Pemerintah dan sektor swasta sering kali berusaha menangani masalah-masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, banyak

tantangan yang masih memerlukan solusi inovatif dan berkelanjutan. Inisiatif sosial, seperti usaha alternatif, menjadi salah satu solusi yang menjanjikan untuk menghadapi tantangan ini dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berdampak.

Banyak masyarakat, terutama di daerah Lekok, menghadapi kondisi yang tidak menentu membuat ekonomi yang tidak kunjung membaik. Hal ini dikarenakan Masyarakat nelayan hanya sebagai pekerja nelayan saja dan sudah memiliki tengkulak yang memberikan permodalan diawal, namun hasil tangkapan mereka harus di jual ke tengkulak tersebut tentunya harga lebih murah dari harga pasar dikarenakan semua peralatan mulai dari kapal,jaring hingga bahan bakar mereka pinjam atau hutang ke tengkulak tersebut, sehingga dengan kondisi seperti ini bagi nelayan sangat sulit untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonominya.

Menghadapi hal tersebut Lazismu Kab Pasuruan dalam pilot program tentang Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Melalui Program Pemberdayaan Nelayan. Program ini berfokus pada rendahnya pendidikan yang diterima oleh warga lekok yang membuat ekonomi masyarakat di sana terus menurun ditambah lagi kondisi social yang terjerat dengan tengkulak semakin menambah kerasnya kehidupan masyarakat lekok.

Lazismu Kab Pasuruan dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Melalui Program Pemberdayaan Nelayan agar isu-isu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan dan lingkungan berencana menjalankan program-program strategis. Program yang akan dilaksanakan Lazismu Kab Pasuruan yakni Program Permodalan Kapal dan alat nelayan, Tercukupinya Kebutuhan Dasar Nelayan, Memiliki Sumber Usaha Alternatif, Kepedulian dan Partisipasi akan Pentingnya Kesehatan, serta Masyarakat Memiliki Kesadaran Pengelolaan Sampah.

Aspek	Deskripsi	Indikator	Means of Verification	Asumsi/Resiko
Goal Deskripsikan tujuan besar dari kegiatan yang akan dilaksanakan	Menurun nya tingkat kemiskinan ekstrim Masyarakat lekok	Tersedianya Sarana prasarana usaha, dukungan manajemen serta teknologi	1. Data baseline-endline masing-masing pilar 2. Data kerawanan sosial YoY 3. Mengamati dan mewawancarai pihak terkait	

			4. Memanfaatkan Sarpras dan Teknologi	
Outcome Rincikan Dampak/harapan jangka pendek	1. Permodalan kapal dan alat nelayan	Kelompok nelayan yang mandiri dan kreatif	Data perolehan tangkapan tiap kelompok nelayan	Meningkatnya penghasilan kelompok nelayan
	2. Tercukupinya Kebutuhan Dasar Nelayan dan ekosistem terjaga	Ekosistem terjaga sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup	Hasil Uji Laboratorium	Sampah di pesisir laut berkurang
	3. Masyarakat memiliki sumber usaha alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup	1. Tersedianya jenis-jenis usaha 2. Peningkatan pendapatan ekonomi keluarga nelayan	1. Data jenis - jenis usaha 2. Data Baseline dan endline 3. Berkurangnya permintaan SKTM	Pendapatan Nelayan Bertambah
	4. Meningkatnya kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	1. 80% Masyarakat hadir ke posyandu 2. Peningkatan partisipasi dalam program kesehatan	1. Presensi kehadiran posyandu 2. Survey tingkat kepuasan masyarakat	Terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
	5. Masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam pengelolaan sampah.	1. 80% Warga mempunyai kebiasaan memilah sampah secara rutin harian 2. 5 hari dalam sepekan mesin pengolah sampah otomatis berjalan optimum	1. Data pengelompokan sampah masing-masing KK 2. Data bobot dan pengolahan sampah produk mesin	1. Warga masih rajin dalam mengelompokkan sampah 2. Warga disiplin mengirim sampah berlebih ke pengelolaan mesin sampah
Output Merupakan kerangka acuan dari program atau proyek dan sifatnya "deliverable" atau dapat dilihat secara kasat mata, dinilai	1.1 Kelompok Sasaran mendapatkan penambahan pengetahuan & inovasi	Perolehan penangkapan ikan meningkat	Dokumentasi kegiatan dan laporan perkembangan Kegiatan Nelayan	Tumbuh kesadaran untuk peningkatan pengetahuan dan inovasi di lingkungan sekitar
	2.1 Pemantauan lingkungan sekitar	Perubahan kondisi pesisir laut sekitar	Dokumenstasi hasil	1. Nelayan menjalankan

akuntabilitasnya atas sumber-sumber yang diberikan	sesuai dengan aturan		pemantauan oleh warga	pemantauan lingkungan laut sekitar dan mencatat hasil secara berkala 2. DLHK telah melakukan pemantauan berkala.
	3.1. Terbentuknya KUB	Adanya kelompok centra industry, Meningkatnya Keterampilan Nelayan	adanya centra industri ikan asin, kerajinan kerang, inovasi produk	Nelayan dapat meningkat ekonominya dengan berwirausaha
	4.1 Peningkatan Pemahaman warga terkait PHBS	Peningkatan jumlah warga yang menerapkan Praktik PHBS	Wawancara, FGD, Survei	Warga memiliki motivasi dan kesadaran yang cukup untuk menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari
	5.1. Masyarakat secara efektif memilah sampah masing-masing rumah	Di setiap rumah sudah terpilah sampah organik dan sampah anorganik	Data pilah sampah masing-masing rumah	Sampah sudah tidak bercecer sembarangan
Aktivitas Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keluaran dan tujuan program.	1.1.1 Pelatihan Pengelolaan ikan	terbentuk pengelola ikan dan pemberian kapal dan alat nelayan	1. Daftar hadir peserta dan fasilitator 2. Rekap materi 3. Dokumentasi acara pelatihan	Pengetahuan pengelolaan ikan meningkat
	2.1.1. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan pencemaran lingkungan (Pantai)	Pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan pencemaran lingkungan (Pantai)	1. Laporan pertanggungjawaban 2. Dokumentasi pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan pencemaran lingkungan	1. Tim Kerja Program sudah siap 2. Nelayan dan Masyarakat sekitar bersedia diberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan pencemaran lingkungan
	3.1.1. Pelatihan Wirausaha	Terbentuknya Kelompok wirausaha ikan	Daftar Hadir, Notulen FGD, dan Rencana	Warga memiliki motivasi dan kesadaran yang

		asin, kerajinan kerang dan Adanya rumusan ide-ide usaha baru	Program Kerja, Kaderisasi 5 Kelompok Wirausaha	cukup untuk menerapkan PHBS
	4.1.1 Workshop/Sosialisasi terkait PHBS	Meningkatnya pemahaman warga tentang PHBS dan pengelolaan sampah dalam menunjang hidup sehat	Presensi, Pre-test/post tes, Dokumentasi	Sampah sudah tidak bercecer sembarangan
	5.1.1 Praktik pemilahan sampah di masing-masing rumah	Melakukan monitoring pemilahan sampah	1. Dokumentasi monitoring pemilahan sampah 2. Data jumlah jenis sampah di masing-masing KK	Tersedianya tempat sampah sesuai klasifikasi yang ada

4. Pemberdayaan Kelompok Ternak Lazismu

Inovasi ini pada dasarnya memberikan bantuan Sapi ternak yang akan dikembangkan oleh kelompok ternak untuk kemaslahatan seluruh kelompok ternak. Adapun Anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 209.500.000 yang berlokasi di Dusun Gesing - Desa Randupitu -Gempol - Kab Pasuruan.

Sasaran Penerima Manfaat: Fakir, Miskin, Ghorimi dengan besaran Manfaat: 1 kandang sapi dan 10 ekor sapi ternak. Durasi Pemberian Bantuan: 6 Bulan Monev. kegiatan pemberdayaan ini akan terus berlanjut hingga menjadi Desa Berkemajuan melalui pemberdayaan ternak.

5. BANKZISKA

Program Bankziska (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Sedekah) adalah program pinjaman modal usaha tanpa Riba untuk umkm supermicro seperti penjual gorengan, es, pentol dll. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.75.450.000. kegiatan ini dilakukan di Bangil, Beji, Pandaan, Gempol dengan sasaran Penerima Manfaat antara lain Ghorimi, Fakir, Miskin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Adapun besaran manfaat yang diterima total terdapat 134 orang senilai Rp.75.450.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bangil : 52 orang senilai Rp.28.600.000
2. Gempol : 41 orang senilai Rp.24.000.000

3. Pandaan : 25 orang senilai Rp.14.350.000
4. Wonorejo : 3 orang senilai Rp.1.500.000
5. Purwodadi : 2 orang senilai Rp.1.100.000
6. Purwosari : 11 orang senilai Rp.5.900.000

Program ini diberikan selama 5 bulan dengan banetuk pinjaman tanpa bunga. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim terutama bagi para pelaku usa kecil yabg terjerat lilitan riba. Rencana Kedepan program ini akan terus kami tingkatkan hingga yang tadinya penrima bantuan menjadi muzaki.